



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 40 TAHUN 2022**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2023**

Payakumbuh, Agustus 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial tahun 2023.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan selesainya Rencana Kerja Perangkat Daerah ini, diharapkan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial dapat mempedomani Renja ini sehingga tujuan dan sasaran yang kita harapkan dalam pencapaian program prioritas pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk satu tahun kedepan dapat dicapai.

Terakhir kami menyadari bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih membutuhkan perbaikan- perbaikan dan penyesuaian lebih lanjut. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan Renja ini dimasa yang akan datang, terima kasih.

Payakumbuh, Agustus 2022


KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

HARMEN, SH
NIP.19670816 199308 1 001



SALINAN

BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2023 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2023.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2023.

BAB II

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2023 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2023 dan Renstra PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- (3) PD menyusun RKA Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Renja PD.

Pasal 6

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2023.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 4 Agustus 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 4 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022 NOMOR 40

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA


ERI FORTUNA, SH
NIP.19660104199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 40 TAHUN 2022	li
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I	: PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang.....	I-1
	1.2 Landasan Hukum.....	I-12
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-15
	1.4 Sistematika Penulisan.....	I-15
BAB II	: HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial	II-17
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.....	II-41
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	II-47
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-56
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-70
BAB III	: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	III-75
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial.....	III-77
	3.3 Program dan Kegiatan.....	III-80
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL	
	4.1 Rencana Kerja Dinas Sosial.....	IV-97
	4.2 Pendanaan.....	IV-99
BAB V	: PENUTUP	V-112
LAMPIRAN	: Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 391 Tahun 2021 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Formasi Jabatan Ex-Officio	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	: Kalender Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023.....	I-6
Tabel II.1	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2020 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-18
Tabel II.2	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2021 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-23
Tabel II.3	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-43
Tabel II.4	: Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Sosial.....	II-46
Tabel 2.3.1	: Data Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-49
Tabel 2.3.2	: SWOT Analisa Internal dan Eksternal	II-53
Tabel 2.3.3	: Analisis Strategi dengan Faktor SWOT Matriks SWOT.....	II-54
Tabel II.4	: Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-58
Tabel II.6	: Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-71
Tabel 3.3.1	: Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	III-80
Table TB.36	: Identifikasi permasalahan untuk penentuan program prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota (Analisa data capaian kinerja tahun 2021).....	III-85
Tabel 3.3.2	: Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.....	III-87
Tabel 4.1	: Rencana Target Kinerja IKU KD/ IKU OPD	IV-97
Tabel 4.2	: Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2022.....	IV-98

Tabel 4.3	: Rencana Kebutuhan Pendanaan berdasarkan urusan , Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023.....	IV-100
------------------	---	---------------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan mempertajam program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada RKPD tersebut.

Renja Dinas Sosial Tahun 2023 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Renja Dinas Sosial menterjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya.

Penyusunan Renja Dinas sosial mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023, hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan Perangkat Daerah dan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

Dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2023, Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Dengan berpedoman pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 Pasal 16 Ayat 2, adapun tahapan penyusunan Renja Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

I. Persiapan Penyusunan;

Meliputi Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. Pembentukan struktur organisasi tim penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023, Orientasi dan penyusunan agenda kerja tim difasilitasi oleh Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota. Tahapan Persiapan ini dilaksanakan pada bulan November 2021.

II. Penyusunan Rancangan Awal;

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 diselaraskan dengan rencana pembangunan provinsi dan Nasional dengan merujuk pada RPJMN 2020-2024 serta rencana kerja perangkat daerah dan kementerian terkait masing- masing, sesuai dengan pasal 126 penyusunan rancangan awal Renja perangkat daerah dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan November. Sehingga untuk rancangan awal Renja Dinas Sosial Tahun 2023, direncanakan selesai minggu pertama bulan Desember 2021. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Renstra dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara

program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan perkiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan evaluasi Renja Tahun lalu dan Tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Sehingga rancangan awal Renja ini mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil Perangkat Daerah Tahun lalu.

III. Penyusunan Rancangan;

Penyusunan rancangan merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian disampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi oleh tim dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan awal RKPD menjadi Rancangan RKPD. Rancangan Renja perangkat daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala perangkat daerah kepada Kepala Bapelitbang.

IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah;

Sesuai dengan Pemendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 136 ayat 1, dijelaskan bahwa forum perangkat daerah dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah berkoordinasi dengan Bapelitbang. Forum gabungan Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditanda tangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum gabungan Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah.

V. Perumusan Rancangan Akhir;

Rancangan akhir renja merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD, sistematika penyajian rancangan akhir Renja sama dengan rancangan awal Renja.

VI. Penetapan.

Pada tahapan rancangan akhir Renja Dinas Sosial Tahun 2023 di sampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi oleh tim, paling lambat 1 minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Setelah diverifikasi disempurnakan kembali oleh Dinas Sosial Rancangan Akhir Renja diserahkan kembali ke Bapelitbang untuk diajukan penetapannya paling lambat satu bulan setelah Perkada RKPD ditetapkan.

Setiap tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terlepas dari tahapan proses penyusunan RKPD Pemerintah Daerah. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan bahan dalam penyusunan rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD setelah penyempurnaan berdasarkan konsultasi publik merupakan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kesesuaian dan keselarasannya dengan rancangan awal RKPD, merupakan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan akhir RKPD dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja diverifikasi keselarasannya dengan Perkada tentang RKPD oleh Bapelitbang, untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

Renja OPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja OPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti

RKPD, Renstra OPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 merupakan kerangka acuan dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan di bidang sosial agar tercapai sinergi yang optimal sehingga pembangunan di bidang sosial yang dilaksanakan dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
 23. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 77);

24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2023 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Sosial.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial untuk tahun 2023

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Sosial ini ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Sosial dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2023.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Sosial.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial pada tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023 ini terdiri dari beberapa BAB sebagai berikut:

- I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja Dinas Sosial, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, landasan penyusunan dan sistematika penulisan

- II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu, yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Sosial, analisis kinerja pelayan Dinas Sosial, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, yang memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial, program dan kegiatan tahun 2023.
- IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Berisikan Rencana kerja dan pendanaan Dinas Sosial Tahun 2023.
- V. Penutup berisikan ketentuan penutup.
- VI. Lampiran Keputusan Bupati Nomor 391 Tahun 2021 tentang pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu (tahun n-2) (tahun 2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) (tahun 2022), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja Dinas Sosial sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Sosial berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Sosial mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Sosial dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Sosial.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Sosial; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Sosial, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial sampai dengan Tahun 2021 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel II.1.

Tabel II.1 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2020
Kabupaten Lima Puluh Kota

SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
	Wajib										
	PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP DINAS SOSIAL										
01	06	01	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran					
01	06	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan yang dipenuhi kebutuhan surat menyurat	60 bulan	12		12	20%
01	06	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan yang dipenuhi untuk pembayaran Telepon, Air, Listrik, Kawat/Faxcimi/Internet	60 bulan	12		12	20%
01	06	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Bulan yang dipenuhi kewajiban pembayaran pajak dan perizinan kendaraan Roda 6, Roda 4 dan Roda 2	60 bulan	12		12	20%
01	06	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	60 bulan	12		12	20%
01	06	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Bulan yang dipenuhi kebutuhan alat kebersihan Kantor	5 Paket	1		1	20%
01	06	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Bulan yang dipenuhi kebutuhan Perbaikan Peralatan Kerja	60 bulan	12		12	20%
01	06	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Bulan yang di Penuhi kebutuhan alat tulis kantor	5 Paket	1		1	20%
01	06	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan yang dipenuhi cetak dan penggandaan.	60 bulan	12		12	20%
01	06	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Bulan yang dipenuhi Alat Listriknya	5 Paket	1		1	20%
01	06	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bulan yang dipenuhi Pembayaran langganan bahan bacaan, surat kabar dan majalah	60 bulan	12		12	20%

01	06	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Bulan yang dipenuhi untuk penyediaan Makan dan Minum Rapat dan Tamu	60 bulan		12					12	20%
01	06	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Bulan yang dipenuhi untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sesuai kebutuhan	60 bulan		12					12	20%
01	06	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur									
01	06	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5 Paket		1					1	20%
01	06	01	02	10	Pengadaan Mobiler	Jumlah Paket pengadaan Mobiler kantor	5 Paket		-					-	0%
01	06	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Bulan pelaksanaan jasa sopir dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60 bulan		12					12	20%
01	06	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur									
01	06	01	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Stel pakaian dinas	290 stel		200					200	69%
01	06	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
01	06	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP,PK,IKU,RKT,Renja, Penyusunan RKA 2020, Penyusunan RKA 2019, LKPD, LPPD dan EKPPD	40 dokumen		24					24	60%
01	06	01	06	03	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	5 dokumen		3					3	60%
01	06	01	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun.	5 dokumen		3					3	60%
01	06	01	06	06	Monitoring, Pengendalian dan Pembuatan laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD	Jumlah Bulan yang dipenuhi untuk Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan APBD	60 bulan		36					36	60%

01	06				URUSAN SOSIAL														
01	06	01	15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya.	Terlaksananya pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya													
01	06	01	15	02	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) PSM, TKSK, Petugas dan Pendamping Sosial, honor (tali asih PSM,TKSK)	5	kegiatan	1								1	20%	
01	06	01	15	03	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Terlaksananya Pembentukan KUBE-FM Penumbuhan dan Pemberdayaan, Monitoring dan Evaluasi Terhadap Perkembangan Usaha KUBE-FM Yang Telah Tumbuh dan Berkembang	5	kegiatan	1								1	20%	
01	06	01	15	06	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya peningkatan keterampilan berusaha dan UEP bagi wanita KTK, dan WRSE	5	kegiatan	1								1	20%	
01	06	01	15	07	Kegiatan : Identifikasi, Pendataan dan Penguatan Kapasitas	Terlaksananya Verifikasi dan Validasi data BDT, Terlaksananya Bimtek bagi PMKS untuk verifali BDT	5	kegiatan	1								1	20%	
01	06	01	01		Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Pelayanan, Pemberdayaan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Terhadap PMKS			-										
01	06	01	16	01	Pengembangan Kebijakan Tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik bagi Peny. Cacat dan Lansia.	Bantuan bagi Lansia terlantar dan lansia tidak potensial, pemberian UEP untuk lansia Produktif dan pemberian alat bantu untuk lansia	5	kegiatan	1								1	20%	
01	06	01	16	07	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Terlaksananya Peningkatan SDM bagi PSKS dan pemberdayaan masyarakat, terlaksana bantuan RUTILAHU bagi PMKS.	5	kegiatan	1								1	20%	

01	06	01	16	08	Kegiatan : Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS	Vallidasi Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional dan verifali data PBIJKSS dan PBIJKN APBD	5	kegiatan	1					1	20%
01	06	01	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan sosial	pendistribusian Rastra dan terkoordinirnya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	5	kegiatan	1					1	20%
01	06	01	16	10	Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Pendistribusian bantuan tanggap darurat, terlaksananya peningkatan kemampuan anggota TAGANA, serta pembinaan terhadap daerah yang rawan konflik sosial	5	kegiatan	1					1	20%
01	06	01	17		Program Pembinaan Anak terlantar	Terwujudnya pembinaan terhadap anak terlantar									
01	06	01	17	02	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar	Pelatihan bagi anak terlantar dan pengiriman anak terlantar kepanti PSBR Harapan Padang Panjang, Trimurni Padang Panjang dan Budi Utama Lubuk alung	5	kegiatan	1					1	20%
01	06	01	17	05	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar	Bimbingan teknis bagi tenaga pembina anak terlantar.	5	kegiatan	-					-	0%
01	06	01	18		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Terwujudnya pembinaan para penyandang cacat dan trauma									
01	06	01	18	03	Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma, Terlaksananya Pengiriman Penyandang Cacat ke Panti Sosial Rehabilitasi.	5	kegiatan	1					1	20%
01	06	01	18	04	Kegiatan : Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Truma	Terlaksananya Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas Keliling dan Pemberian Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas.	5	kegiatan	1					1	20%

01	06	01	19		Program : Pembinaan Panti asuhan / Panti Jompo	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Panti Asuhan/ Jompo													
01	06	01	19	03	Kegiatan : Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan /jompo	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Panti /jompo	5	kegiatan										-	0%
01	06	01	20		Program : Pembinaan Eks penyandang Cacat Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Terlaksananya pembinaan terhadap eks penyandang penyakit sosial													
01	06	01	20	01	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Melalui Pelatihan Kewirausahaan Bagi EKS Penyandang Penyakit Sosial dan Pengiriman Eks Penyakit Psikotik ke Panti Sosial Rehabilitasi.	5	kegiatan		1								1	20%
01	06	01	21		Program : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial	Terlaksananya Pemberdayaan terhadap kelembagaan kesejahteraan sosial													
01	06	01	21	01	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan dunia usaha	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pembinaan Terhadap Dunia Usaha/ Karang Taruna Nagari	5	kegiatan		1								1	20%
01	06	01	21	04	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Terlaksananya pengembangan model kelembagaan jaminan sosial dan sosialisasi pelatihan pos daya	5	kegiatan		1								1	20%
01	06	01	21	11	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan kejuangan	Peringatan Hari Pahlawan 10 November	5	kegiatan		1								1	20%

Tabel II.2 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2021

Kabupaten Lima Puluh Kota

SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota														
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
					Urusan Sosial		Kolom ini kosong untuk tahun 2026							
06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan	95%		95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	01	2.01			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	95%		95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum OPD dan RENJA	12 Dokumen		2	2	100%	2	4	33%
06	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA	6 Dokumen		1	1	100%	1	2	33%
06	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA Perubahan	6 Dokumen		1	1	100%	1	2	33%
06	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA	6 Dokumen		1	1	100%	1	2	33%
06	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan	6 Dokumen		1	1	100%	1	2	33%
06	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP, SPIP, LKPJ, EKPPD, LPPD, PK, RKT, Rencana Aksi, Realisasi Rencana Aksi, SPM dan Laporan Capaian Kinerja	72 Dokumen		12	12	100%	12	24	33%

06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah OH yang Melaksanakan Evaluasi Kinerja dan Monitoring Kegiatan APBD	516 OH		61	61	100%	71	132	26%
06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan Laporan OPD	95%		95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Honor PA, KPA, PPK, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara, Pejabat Pengadaan dan PPHP	72 Bulan		12	12	100%	12	24	33%
06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPJ dan Jumlah SPJ Kegiatan untuk Verifikasi	72 Dokumen		12	12	100%	12	24	33%
06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	6 Dokumen		1	1	100%	1	2	33%
06	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6 Dokumen		-	-	0%	1	1	17%
06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	72 Bulan		12	12	100%	12	24	33%
06	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	6 Dokumen		1	1	100%	1	2	33%
06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	95%		95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan RKBMD dan RKPBMMD	12 Dokumen		2	2	100%	2	4	33%

06	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD	12 Dokumen			2	2	100%	2	4	33%
06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95%			-	-	0%	95%	95%	95%
06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Keengkapannya	Jumlah Stel Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya/ Pakaian Khusus Hari Tertentu yang diadakan	420 Stel			-	-	0%	70	70	17%
06	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah OH yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54 OH			-	-	0%	9	9	17%
06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	95%			95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listik yang diadakan	72 Bulan			12	12	100%	12	24	33%
06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72 Bulan			12	12	100%	12	24	33%
06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	72 Bulan			-	-	0%	12	12	17%
06	01	2.06	04	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Jumlah Bulan Alat Kebersihan yang diadakan	72 Bulan			12	12	100%	12	24	33%
06	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72 Bulan			12	12	100%	12	24	33%
06	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah Pembayaran Bahan Bacaan dan Surat Kabar	72 Bulan			12	12	100%	12	24	33%

06	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Porsi Makan dan Minum Tamu yang disediakan	5.598 Porsi		626	626	100%	727	1.353	24%
06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Porsi Makan dan Minum Rapat dan Jumlah OH yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4.532 Porsi dan 870		618	618	100%	862	1.480	27%
06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persetase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%		95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-				0%	0	-	0%
06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Roda 2 dan Kendaraan Roda 4	3 Unit Kendaraan Roda 4 dan 6 Unit Kendaraan Roda 2		3	3	100%	0	3	33%
06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Lemari Arsip, Kursi Tamu, Kursi Rapat, Meja, Rak Buku/Koran		3	3	100%	0	3	50%
06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Mesin lainnya	Laptop, Notebook, Computer, Printer, UPS, AC, CCTV, FingerPrint, TV, Kulkas		8	8	100%	0	8	11%
06	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit				0%	0	-	0%

06	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit					0%	0	-	0%
06	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%		95%	95%	100%	95%	95%	95%	95%
06	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Bulan		12	12	100%	12	24	33%	
06	01	2.08	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet	72 Bulan		12	12	100%	12	24	33%	
06	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72 Bulan		-	-	0%	12	12	17%	
06	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Gaji PTT, THL dan Honor Pengurus barang Pengguna	72 Bulan		12	12	100%	12	24	33%	
06	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	95%		95%	95%	100%	95%	95%	95%	
06	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit		-	-	0%	1	1	17%	
06	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	72 Bulan		12	12	100%	12	24	33%	

06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rata-rata Perbaikan Peralatan Kantor yang dilakukan dalam Satu Tahun	72 Bulan			12	12	100%	12	24	33%
06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pekerjaan Rehab Berat Gedung Kantor	6 Paket			1	1	100%	1	2	33%
06	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket			0	0	0%	0	-	0%
06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang di Berdayakan	95%			95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	95%			95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Manusia PSM dan Pemilihan Pilar-pilar Berprestasi	81 Orang PSM			81	81	100%	81	81	100%
06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia TKSK dan Pemilihan Pilar-Pilar Berprestasi	78 Orang TKSK			13	13	100%	13	26	33%
06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana PPKS, Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat (RLTH) Pengadaan Bangunan Warung Binaan Sosial (Warbinsos), Jumlah Pemberian Bantuan UEP Fakir Miskin dan UEP KUBE	150 RLTH, 6 kali Sosialisasi, 300 KPM dan 30 Klpk			90	90	100%	81	171	35%
06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Karang Taruna Yang Mengikuti Sosialisasi dan Lomba Karang Taruna dan Jumlah PSKS Kelembagaan Masyarakat yang di berdayakan	80 Karang Taruna, 11 LKS, 1 LKKS, Sosialisasi dan Musda LKKS			92	92	100%	92	184	100%

06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Sosial dan Penyerahan Bantuan untuk Masyarakat	6 Sosialisasi, 60 Orang Bantuan			11	11	100%	11	22	33%
06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban	25%			-	-	0%	0%	0%	0%
06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban	25%			-	-	0%	0%	0%	0%
06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak	Jumlah Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban	6 orang			-	-	0%	0%	0%	0%
06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	85%		85%	85%	100%	85%	85%	85%	85%
06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	85%		85%	85%	100%	85%	85%	85%	85%
06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Bantuan Permakanan bagi Lansia Terlantar, Lansia Tidak Potensial UEP bagi Lansia	11972 Orang Permakanan Lansia dan 180 Orang UEP Lansia			1.972	1.972	100%	2.000	3.972	16%
06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Bantuan Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Bayi Terlantar dan Disabilitas Terlantar	596 Orang			89	89	100%	89	178	30%
06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Pemberian Alat Bantu Cacat bagi Lansia	528 Orang			80	80	100%	80	160	30%

06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikas Keluarga	360 Kasus ABH/ Anak Terlantar		53	53	100%	60	113	31%
06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Pelatihan, Pelayanan dan Bantuan UEP bagi Penyandang Disabilitas, Tersedianya Rumah Idaman UIIS/Rumah Antara/Rumah Singgah bagi Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan	273 Orang, 1 Rumah Singgah		23	23	100%	50	73	27%
06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat	150 Orang		-	-	0%	25	25	5%
06	04	2.01	08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pelatihan bagi Anak Terlantar dan Putus Sekolah dan Pengiriman Anak ke Panti Rehabilitasi dan Bimbingan Lanjut untuk Anak terlantar (Putus Sekolah)	480 Orang		43	43	100%	80	123	26%
06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	30 Orang		0	0	0%	0	-	0%
06	04	2.01	11	Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	30 Orang		0	0	0%	0	-	0%
06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Pengiriman Penyandang Disabilitas ke Panti Rehabilitasi Sosial	169 Orang		15	15	100%	32	47	28%

06	04	2.02			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	85%		85%	85%	100%	85%	85%	85%
06	04	2.02	02		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	60 Orang	-	-	0%	-	0%	0%	
06	04	2.02	03		Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Permakanan	180 Orang	-	-	0%	-	0%	0%	
06	04	2.02	04		Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	180 Orang	-	-	0%	-	0%	0%	
06	04	2.02	05		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyediaan Alat Bantu	90 Orang	-	-	0%	-	0%	0%	
06	04	2.02	06		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	60 Orang	-	-	0%	-	0%	0%	
06	04	2.02	07		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan bantuan UEP dan bimbingan lanjut untuk wanita tuna susila	140 orang	10	10	100%	25	35	25%	
06	04	2.02	08		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	60 Orang	-	-	0%	-	-	0%	
06	04	2.02	10		Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Validasi Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional, PBI JKSS, PBI Jamkesda dan PBI JKN APBD Serta Sosialisasi	Jamkesda 18.500 Jiwa, PBI JKN 176.017 Jiwa, PBI JKSS 17.874 Jiwa	193.844	193.844	100%	212.391	406.235	191%	

06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	60 Orang	-	-	0%	-	-	0%
06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	60 Orang	-	-	0%	-	-	0%
06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Pemberian Layanan Rujukan	60 Orang	-	-	0%	-	-	0%
06	04	2.02	14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Panti di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Jumlah Tenaga Pembina Anak Terlantar yang mengikuti Bimbingan Teknis	9 Panti 150 orang	0	0	0%	0	-	0%
06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
06	05	2.01		Pemeliharaan Anak Terlantar	Persentase Pemeliharaan Anak Terlantar	85%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	108 orang			0%		0%	0%
06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Rujukan Anak - Anak Terlantar	130 orang			0%		0%	0%
06	05	2.01	03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	156 orang			0%		0%	0%
06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data BDT serta Pendataan PPKS dan PSKS	13 Kecamatan	13	13	100%	13	26	200%
06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP) Sembako	24.994 KPM	25287	25287	100%	24.994	50.281	201%

06	05	2.02	03	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Monitoring Penyaluran Bantuan Keluarga Harapan (PKH)	16.898 KPM		17130	17130	100%	16.898	34.028	201%
06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Bantuan UEP untuk WRSE dan KTK	25 KTK 25 WRS, 264 UEP KTK dan WRSE		54	54	100%	50	104	33%
06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Tertangani	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	95%		95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Penyediaan Makanan dan Pembangunan Gudang Logistik	858 Paket 1 Gudang Logistik		140	140	100%	150	290	34%
06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang untuk Korban Bencana	900 Paket		0	0	0%	0	0	0%
06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsian	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1 Unit		0	0	0%	0	0	0%
06	06	2.01	04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dan orang terlanjar dalam perjalanan	72 orang		0	0	0%	0	0	0%
06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Penggantian transportasi Tagana dan selter Pengungsi	82 Orang Tagana dan 1 selter Pengungsi		0	0	0%	0	0	0%

06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	95%		95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Sosialisasi untuk Kampung Siaga Bencana dan Pembentukan Kampung Siaga Bencana	6 Sosialisasi 1 Kampung Siaga Bencana		0	0	0%	0	0	0%
06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dan Perekrutan Tagana Muda	150 orang		25	25	100%	25	50	33%
06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Makam Pahlawan yang Terkelola dengan Baik	95%		95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	95%		95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Rehab sarana dan Prasarana Makam Pahlawan dan Peringatan Hari Pahlawan 10 November	6 Rehab, 6 Kali Peringatan		2	2	100%	2	4	33%
06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Makam		0	0	0%	0	0	0%
06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Hari Kerja Tenaga Pengamanan Taman Makam Pahlawan	72 Bulan		12	12	100%	12	24	33%

Realisasi program, kegiatan dan Sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : pada tahun 2020 program dan kegiatan telah memenuhi target kinerja dan hasil kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan seperti :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional , Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran, Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Monitoring, Pengendalian dan Pembuatan laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD semua program dan kegiatan terealisasi. Pengadaan tidak terealisasi karena keterbatasan anggaran.

Urusan Sosial Program dan Kegiatan tahun 2020 yang terealisasi adalah Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya dengan kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya, Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin, Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah Kesejahteraan Sosial, Identifikasi, Pendataan dan Penguatan Kapasitas. Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial kegiatan Pengembangan Kebijakan Tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik bagi Peny. Cacat dan Lansia, Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS, Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS, Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan sosial, Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. Program Pembinaan Anak terlantar, Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar, eningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma Kegiatan : Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Truma Program : Pembinaan Panti asuhan / Panti Jompo Kegiatan : Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan /jompo Program : Pembinaan Eks penyandang Cacat Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) Kegiatan : Program : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial, Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan dunia usaha, Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan kejuangan, semua program dan kegiatan berjalan dengan baik.

Realisasi program, kegiatan dan Sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : pada tahun 2021 program dan kegiatan telah memenuhi target kinerja dan hasil kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan seperti :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penataanusahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor, Pengadaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, kegiatan enyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Pada program penunjang urusan pemerintah daerah ini semuanya telah memenuhi target yang direncanakan untuk tahun 2021 dan ada yang tidak memenuhi target yang direncanakan karena penganggaran tahun 2022 di kurangi akibat adanya Refocusing Anggaran untuk penanganan Covid-19, ada beberapa sub kegiatan di hilangkan untuk perencanaan tahun 2022.

Pada kegiatan urusan Sosial Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil dan keluaran dan ada yang tidak memenuhi target kinerja hasil karena Refocusing Anggaran (Covid-19), seperti penjelasan di bawah ini :

Urusan sosial :

- PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota keluaran kegiatan ini Jumlah Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Manusia PSM dan pemilihan pilar- pilar berprestasi sebanyak 81 orang, Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota keluaran kegiatan jumlah Pemilihan TKSK Berprestasi Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota dan Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia TKSK sebanyak 13 orang. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana PMKS (RTLH) dan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dan RTLH dengan keluaran sebanyak 25 RTLH dan 1 kali sosialisasi, Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan keluaran kegiatan Jumlah Karang Taruna yang Mengikuti Bimtek sebanyak 80 orang, Jumlah Pemberian Bantuan KUBE Penumbuhan 1 kelompok, Jumlah Pemberian Bantuan UEP Fakir Miskin sebanyak 36 orang dan Sosialisasi dan Pertemuan Evaluasi KUBE dan UEP sebanyak 2 kali sosialisasi. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) engan keluaran kegiatan Jumlah Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Sosial dan Penyerahan Bantuan Sosial Barang (Bantuan Sandang Pangan) untuk Lansia keluaran kegiatan ini 1 kali sosialisasi dan 10 orang penerima bantuan. Pada Program Pemberdayaan sosial ini semua sub kegiatan terealisasi 100 % sesuai dengan target.

- PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan keluaran kegiatan Jumlah Bantuan Permakanan Lansia Terlantar, Lansia Tidak Potensial sebanyak 1.912 Orang penerima, Sub kegiatan Penyediaan Sandang dengan keluaran Jumlah

Bantuan Sandang untuk Lansia Terlantar (44 Orang), Anak Terlantar/ Putus Sekolah (39 Orang), Bayi Terlantar/ Balita Terlantar (5 Orang) Bagi Anak Sekolah Tingkat SD s/d SLTP (Anak, Sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu dengan keluaran Jumlah Pemberian Alat Bantu Cacat Bagi Lansia sebanyak 80 orang, Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga dengan keluaran umlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga terhadap anak berhadapan dengan Hukum sebanyak 53 orang.Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dengan keluaran kegiatan Jumlah Bantuan UEP Bagi Penyandang Disabilitas sebanyak 23 orang, Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dengan keluaran kegiatan Pengiriman Anak Ke Panti Sosial Rehabilitasi sebanyak 43 orang, Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan dengan keluaran kegiatan Jumlah Pengiriman Penyandang Disabilitas Ke Panti Rehabilitasi sebanyak 15 orang.

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dengan keluaran kegiatan Jumlah Bantuan UEP Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi) sebanyak 10 orang, Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dengan keluaran Verifikasi dan Validasi data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Jamkesda 7.220 Jiwa, Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) 16.8750 Jiwa, Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) 17.874 Jiwa,

- PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data BDT serta Pendataan PPKS/PSKS untuk sebanyak 13 Kecamatan, Sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota keluaran kegiatan Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP)/ Sembako 25.287 KPM, Sub

Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan keluaran kegiatan Monitoring Penyaluran Bantuan Keluarga Harapan (PKH) 17.130 Orang KPM, Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan keluaran kegiatan Pelatihan dan Pemberian Bantuan sosial Barang Bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) 20 orang, Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 20 orang dan Bantuan UEP untuk KTK dan WRSE 14 orang, Program perlindungan dan jaminan sosial semua sub kegiatan terealisasi 100 %.

- PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dengan keluaran Jumlah Penyediaan Makanan untuk korban bencana alam dan sosial dengan realisasi Korban Bencana Alam 1.146 Jiwa dan korban Bencana Sosial 119 Jiwa. Sub Kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan keluaran kegiatan Jumlah Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan (Mayat Terlantar) dan Jumlah Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan (orang Terlantar dalam Perjalanan), Sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial dengan keluaran kegiatan Jumlah Penggantian Transportasi Tagana. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan keluaran kegiatan Jumlah Sosialisasi untuk Tagana dan Masyarakat Rawan Bencana sebanyak 25 orang

- PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota keluaran kegiatan Jumlah Pengerjaan DAM Tebing Dibelakang Gedung Kantor Makam Pahlawan Lurah Kincie Kecamatan Situjuh Limo Nagari 1 makam, Peringatan Hari Pahlawan 10 November 1 kali peringatan. Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan keluaran kegiatan Jumlah Bulan Kerja Tenaga Kontrak (Tenaga Keamanan Makam Pahlawan) yang Dibayarkan sebanyak 12 bulan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria) dan SPM , maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. (IKK sama dengan IKD dalam RPJMD Bab VII).

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan (Misalnya : data yang diluar Renstra dan di Luar RPJM tetapi dihasilkan oleh OPD dan terkait dengan Tupoksi OPD)

Jika perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing- masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Dinas Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial :

1. Jenis Pelayanan Dasar , Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, Indikator Pencapaian Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
2. Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, indikator pencapaian Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
3. Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, indikator pencapaian jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
4. Jenis pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, Indikator pencapaian jumlah warga

Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti.

5. Jenis Pelayanan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota, Indikator Pencapaian Jumlah warga negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, yang disesuaikan dengan format terlihat pada table II.3 berikut ini :

Tabel II.3 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1		3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	v		38	25	25	25	38	25	25	25	
2	Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	v		84	30	20	25	84	30	20	25	
3	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	v		2.105	263	275	300	2.044	263	275	300	
4	Jumlah warga Negara /Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	v		0	0	0	18	0	0	0	18	
5	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	v		1.265	126	173	180	1.265	126	173	180	
6	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial		v	83	85,2	86,8	88,2	65	86,8	86,8	88,2	
7	Persentase PMKS yang tertangani		v	93	93,5	94,5	95,2	95	94,5	94,5	95,2	
8	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		v	93,1	93,3	93,6	93,8	100	93,6	93,6	93,8	
9	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		v	98	98	98	98	0	98	98	98	
10	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap		v	98	98	98	98	0	98	98	98	
11	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		v	62	63	64	65	0	64	64	65	
12	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		v	7,6	7,6	7,6	7,6	39,9	7,6	7,6	7,6	
13	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota		v	100	100	100	100	100	100	100	100	

Analisa Indikator :

1. Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
2. Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
3. Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
4. Jumlah warga Negara /Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
5. Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.
6. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial.
7. Persentase PMKS yang tertangani.
8. Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
9. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.
10. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.
11. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.
12. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.
13. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota.

Dari indikator pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeran (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 Bab VIII dan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ada 13 (tiga belas) indikator untuk pencapaian kinerja. Dalam table diatas target pencapaian ada yang mengalami kenaikan setiap tahun ada yang sama setiap tahun. Ini dikarenakan untuk mencapai target pencapaian tergantung kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial nya.

Tabel II.4
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Sosial

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	80	72	74	76	95	74	74	76	
2.	Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	95	95	95	95	95	95	95	95	
3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	65	65	65	65	69,79	65	65	65	
		Nilai IRB	16,35	16,50	16,75	17,00	16,35	16,75	16,75	17,00	
		Nilai IKM	85	85	85	85	85	85	85	85	

Analisa Indikator Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial.

1. Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Analisa terhadap Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seberapa banyak pelayanan kepada PPKS pada tahun n bagi jumlah PPKS pada tahun n. Data naik turun ini berpengaruh kepada anggaran tiap tahun yang dikelola oleh Dinas Sosial. Semakin banyak anggaran semakin banyak PPKS yang terlayani.

2. Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial . Target untuk peran aktif PSKS dalam Penyelenggaraan PSKS adalah tetap karena disini di nilai seberapa banyak PSKS yang berperan aktif dalam penanganan kesejahteraan sosial apada tahun n di bagi dengan jumlah keseluruhan PSKS yang ada pada tahun n

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah

Indikator yang di nilai pada Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Sosial yang ke 3 yaitu Nilai AKIP, Nilai IRB dan Nilai IKM Dinas Sosial . Pada pencapaian target ini berdasarkan nilai yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun yang di nilai.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Pada bab ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota khusus Provinsi , Kementerian dan lembaga di tingkat pusat.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023.

Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah khususnya Provinsi. Mengenai koordinasi dan sinergi program antara perangkat daerah Provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan. Secara filosofis, tugas dan fungsi Kementerian Sosial berfokus pada upaya mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial agar mereka dapat berdaya dan berfungsi sosial, mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka alami, serta berperan aktif dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Menyelenggarakan urusan bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Visi Kementerian Sosial adalah : “Kementerian Sosial yang andal, professional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden : ‘ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong “. Dalam penerapan Renstra kementerian Sosial yang mengacu pada RPJMN 2020-2024 dan Nawacita yang telah ditetapkan , mendukung Prioritas Pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Presiden selaku Kepala Pemerintahan . Sehingga dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi kemiskinan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi perangkat daerah, dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka identifikasi permasalahan dan hambatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah di bidang sosial dengan penyelenggaraan perencanaan yang berorientasi kepada penyelenggaraan pelayanan yang muaranya terhadap kesejahteraan masyarakat. Identifikasi ini difokuskan terhadap permasalahan urusan sosial. Data permasalahan dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.1
Data Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar	Kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana

Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau disebut juga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ada 26 Jenis :

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang berhadapan dengan hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK)

6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah.
7. Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalah Gunaan NAPZA
18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap pencapaian program nasional /internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dengan Visi :

“ Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah ” Adapun

misi Kepala Daerah yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah Misi ke-1 meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai keagamaan, dengan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat
 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
2. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.

Sasaran :

1. Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya.

Misi ke-4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi seutuhnya, dengan tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan Sasaran :

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah : Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor-faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Hasil identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan teknik peta kekuatan (Analisis SWOT).

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam pencapaian target kinerja Dinas Sosial ke depan. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dan mengatasi kelemahan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang ada.

Analisis SWOT dilengkapi dengan informasi yang relevan melalui proses analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian situasi kondisi suatu organisasi, dapat tercakup dalam analisis SWOT yang terdiri atas dua kegiatan utama yaitu analisis internal dan analisis eksternal terhadap keberadaan suatu organisasi. Proses analisisnya sendiri bisa dimulai dari internal dan eksternal dulu atau kedua-duanya secara bersama-sama.

Kekuatan, dapat diwujudkan sebagai suatu sumber daya, keterampilan/kemampuan, atau keuntungan.

Sedangkan **kelemahan** dapat didefinisikan sebagai suatu hal batasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan/kemampuan yang secara serius merintangi performansi efektif suatu organisasi. Fasilitas, sumberdaya financial, kapabilitas manajemen, keterampilan, dapat menjadi sumber dari kelemahan-kelemahan organisasi.

Peluang, merupakan suatu kondisi menguntungkan utama dalam lingkungan organisasi tertentu. Sedangkan **ancaman** dapat berwujud sebagai suatu situasi tidak menguntungkan dari lingkungan organisasi tertentu, dapat juga

diartikan sebagai rintangan-rintangan kunci terhadap posisi organisasi saat ini dan yang diinginkan.

Tabel 2.3.2

SWOT Analisa Internal dan Eksternal

KEKUATAN (Strengths)		KELEMAHAN (Weaknesses)	
S1	Peran utama lembaga yang sangat strategis dalam peningkatan kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	W1	Tenaga sosial yang profesional masih kurang
S2	Motivasi, semangat dan etos kerja aparatur cukup tinggi	W2	Jumlah sumber daya aparatur secara kuantitas belum mencukupi
S3	Fasilitas pendukung kerja cukup memadai	W3	Keterbatasan anggaran
		W4	Kesenjangan kuantitas dan kompetensi personil antar bidang
		W4	Masih kurangnya tenaga TKSK/PSM yang aktif di nagari dan kecamatan

	PELUANG (Opportunities)		ANCAMAN (Threats)
O1	Dukungan dari sumber-sumber kesejahteraan sosial cukup tinggi	T1	Tingginya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
O2	Jaringan kerja lembaga pemerintah dan swasta terbuka pada level regional dan nasional	T2	Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan sehingga meningkatkan kerawanan bencana sosial
O3	Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas PPKS		

Tabel 2.3.3

Analisis Strategi dengan Faktor SWOT Matriks SWOT

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

<p>INTERNAL</p> <p>EKSTERNAL</p>	<p>KEKUATAN (Strengths)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Peran utama lembaga yang sangat strategis dalam peningkatan kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ➤ Motivasi, semangat dan etos kerja aparatur yang cukup tinggi ➤ Fasilitas pendukung kerja cukup memadai 	<p>KELEMAHAN (Weaknesses)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tenaga sosial yang profesional masih kurang ➤ Jumlah sumber daya aparatur secara kuantitas belum mencukupi ➤ Keterbatasan anggaran ➤ Kesenjangan kuantitas dan kompetensi personil antar bidang ➤ Masih kurangnya tenaga TKSK/PSM yang aktif di nagari dan kecamatan
<p>PELUANG (Opportunities)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dukungan dari sumber-sumber kesejahteraan sosial cukup tinggi ➤ Jaringan kerja lembaga pemerintah dan swasta terbuka pada level regional dan nasional ➤ Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas PPKS 	<p><u>STRATEGI S + O</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan peran lembaga dalam memanfaatkan sumber-sumber kesejahteraan sosial ➤ Meningkatkan jaringan kerjasama lembaga pemerintah dan swasta dalam penanggulangan masalah sosial ➤ Meningkatkan sumberdaya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi ➤ Meningkatkan kesejahteraan PPKS 	<p><u>STRATEGI W + O</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan profesional aparatur dalam peningkatan pembinaan potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial ➤ Menggelola anggaran yang berdayaguna berhasil-guna serta efektif dan efisien dalam membangun jaringan kerja yang lebih baik dan luas pada ruang lingkup internal dan eksternal (<i>networking</i>). ➤ Memanfaatkan tenaga TKSK/PSM yang ada untuk meningkatkan kualitas PPKS

ANCAMAN (<i>Threats</i>)	<u>STRATEGI S + T</u>	<u>STRATEGI W + T</u>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tingginya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ➤ Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berawasannya lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menurunkan angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ➤ Meningkatkan penyuluhan bagi daerah-daerah rawan bencana 	<p>Meningkatkan kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial</p>

1. Strategi Kekuatan – Peluang (S – O) :

- a. Meningkatkan peran lembaga dalam memanfaatkan sumber-sumber kesejahteraan sosial
- b. Meningkatkan jaringan kerjasama lembaga pemerintah dan swasta dalam penanggulangan masalah sosial
- c. Meningkatkan sumberdaya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi
- d. Meningkatkan kesejahteraan PPKS

2. Strategi Kelemahan – Peluang (W – O) :

- a. Meningkatkan profesional aparaturnya dalam peningkatan pembinaan potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial
- b. Mengelola anggaran yang berdayaguna berhasil-guna serta efektif dan efisien dalam membangun jaringan kerja yang lebih baik dan luas pada ruang lingkup internal dan eksternal (*networking*).
- c. Memanfaatkan tenaga TKSK/PSM yang ada untuk meningkatkan kualitas PPKS

3. Strategi Kekuatan – Ancaman (S – T) :

- a. Menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- b. Meningkatkan penyuluhan bagi daerah-daerah rawan bencana

4. Strategi Kelemahan-Ancaman (W – T) :

- a. Meningkatkan profesional aparaturnya guna meningkatkan kemandirian PPKS
- b. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya alam (lahan), melalui investasi yang didukung oleh swasta

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dirumuskan sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar bagi pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Belum optimalnya bantuan tanggap darurat bencana
3. Belum optimalnya peran PSKS dalam penanganan PPKS
4. Masih terbatasnya ketersediaan data yang *valid* dan *up to date* di berbagai bidang untuk kepentingan pembangunan;
5. Masih diperlukan nilai- nilai kesetiakawanan sosial
6. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia/aparaturnya di Dinas Sosial

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Sosial dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja Dinas Sosial tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja Dinas

Sosial juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Rancangan awal RKPD Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 sebesar Rp. 9.400.040.000,- (Sembilan Milyar Empat Ratus Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) dan setelah di analisa hasil kebutuhan berdasarkan pagu indikatif OPD untuk RKPD tahun 2023 adalah Rp. 8.552.013.305,- (Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah) rancangan awal dan analisa kebutuhan sesuai dengan kebutuhan ada kegiatan.

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Dinas Sosial disajikan dalam Tabel II.5. berikut:

Tabel II.5 (T-C.31.)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Lima Puluh Kota

SKPD : DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	7.911.411.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	4.418.669.105	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Sinergitas perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	95%	77.000.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	42.367.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	16.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Renstra dan Renja	2 Dokumen	17.204.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	1 Dokumen	9.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah RKA	1 Dokumen	2.351.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen	9.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah RKA Perubahan	1 Dokumen	2.351.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen DPA yang di susun	1 Dokumen	9.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah DPA	1 Dokumen	2.351.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang disusun	1 Dokumen	9.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah DPA Perubahan	1 Dokumen	1.951.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinsos	Jumlah dokumen LKJIP, SPIP, LKPJ, EKPPD, LPPD, Penetapan Kinerja, RKT, Rencana Aksi, Realisasi Rencana Aksi, SPM, PMPRB, SPIP dan Laporan Kinerja	12 Dokumen	17.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen LKJIP, SPIP, LKPJ, EKPPD, LPPD, Penetapan Kinerja, RKT, Rencana Aksi, Realisasi Rencana Aksi, SPM dan Laporan Capaian Kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	11.159.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah OH yang melaksanakan Evaluasi Kinerja dan monitoring Kegiatan APBD	81 OH	7.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah OH yang melaksanakan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan APBD	9 Laporan dan 54 OH	5.000.000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi keuangan	95%	4.453.980.700	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi keuangan	100%	3.483.406.063	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinsos	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan (Honor, PA, KPA, PPK, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara, PPHP, Pejabat	12 bulan	4.400.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinsos	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/Bulan 12 bulan	3.473.531.063	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen SPJ dan Jumlah SPJ Kegiatan yang di Verifikasi	12 dokumen	36.780.700	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen SPJ dan Jumlah	12 dokumen 12 Bulan	2.680.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinsos	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	5.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen 1 Laporan	2.389.000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinsos	Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	4.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinsos	Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0 Dokumen	-	Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2022
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	12 bulan	3.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan 12 Dokumen	2.855.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinsos	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	4.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinsos	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis dan Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen 1 Dokumen	1.951.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase tertib Administrasi Barang Milik Daerah	95%	6.400.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	4.176.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dinsos	Jumlah Laporan RKBMD dan RKPMD	2 Dokumen	3.200.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dinsos	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah RKBMD dan RKPMD	2 Dokumen 2 Dokumen	1.985.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Dinsos	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD	3 Dokumen	3.200.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD	3 Laporan 3 Dokumen	2.191.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95%	44.996.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0%		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinsos	Jumlah Stel Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya/ Pakaian Khusus Hari Tertentu yang diadakan	70 Stel	35.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinsos	Jumlah Stel Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya/ Pakaian Khusus Hari Tertentu yang diadakan	0 Stel	-	Tidak ada ketersediaan dana untuk Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinsos	Jumlah OH yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9 OH	9.996.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinsos	Jumlah OH yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 OH	-	Tidak adanya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	95%	379.309.300	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	194.417.680	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Dinsos	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan	13.500.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangun Kantor	Dinsos	Jumlah alat listrik yang diadakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket 12 Paket	5.999.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinsos	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	10.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinsos	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Bulan	-	Tidak dilaksanakan tahun 2023
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinsos	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinsos	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0 Bulan	-	Tidak dilaksanakan tahun 2023
Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Dinsos	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor dan jumlah bulan alat kebersihan yang diadakan	12 bulan	37.500.000	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Dinsos	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan alat kebersihan yang diadakan	12 Paket 12 Bulan	41.673.480	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinsos	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	36.809.300	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinsos	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan 12 Paket	30.260.700	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinsos	Jumlah bulan pembayaran bahan bacaan dan surat kabar	12 bulan	7.500.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinsos	Jumlah bulan pembayaran bahan bacaan dan surat kabar Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan 12 Dokumen	4.950.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinsos	Jumlah porsi makan minum tamu yang disediakan	872 Porsi	24.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinsos	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah porsi makan minum tamu yang disediakan	24 Laporan 1093 Porsi	17.197.500	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinsos	Jumlah porsi makan minum rapat dan jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	737 Porsi dan 135 OH	240.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah Porsi makan minum rapat	24 Laporan 89 OH 525 Porsi	94.337.000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	95%	2.013.450.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	100%	128.617.362	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinsos	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	450.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinsos	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0 Unit%	-	Tidak adanya anggaran untuk pembelian kendaran dinas jabatan
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinsos	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional (Roda 2)	1 unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2	415.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinsos	Jumlah Unit KendaraanDinas Operasional atauLapangan yang Disediakan Kendaraan Roda 2 (dua)	3 Unit 3 Unit	43.125.000	
	Pengadaan Mebel	Dinsos	Jumlah Pengadaan Mobiler	Lemari arsip, kursi tamu, kursi rapat, meja, rak buku/koran	35.000.000	Pengadaan Mebel	Dinsos	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Lemari Arsip	3 Unit 3 Unit	15.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor dan Mesin Lainnya	2 Unit AC, 2 Unit Kipas Angin, 2 Unit Laptop, 1 Unit Portable Ampli, 2 Unit Printer dan 1 Unit Televisi	113.450.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Laptop	2 Unit 2 Unit	70.492.362	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	500.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	-	Belum adanyaPengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	500.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	-	Anggaran tidak mencukupi untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	330.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	277.850.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinsos	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	8.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinsos	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan surat menyurat	4 Laporan 12 Bulan	1.090.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinsos	Jumlah pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	12 Bulan	55.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinsos	umlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	2 Laporan 12 Bulan	41.570.000	

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinsos	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	7.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinsos	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Bulan		Tidak di anggarkan pada tahun 2023
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinsos	Jumlah Bulan Honor Tenaga Kontrak dan Honor Pengurus Barang Pengguna yang dibayarkan	12 Bulan	260.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinsos	Honor pengurus Baran gPengguna Jumlah bulan gaji PTT Jumlah bulan gaji THL Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan 13 Bulan 12 Bulan 24 Laporan	235.190.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	95%	651.271.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100%	287.835.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinsos	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	35.271.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinsos	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0 Unit		Tidak di anggarkan pada tahun 2023
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Dinsos	Jumlah bulan pemeliharaan rutin, berkala kendaraan dinas operasional	12 Bulan	250.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Dinsos	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Bulan 15 Unit	209.191.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos	Rata-rata perbaikan peralatan kantor yang dilakukan dalam satu tahun	12 Bulan	16.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Rata-rata perbaikan peralatan kantor yang dilakukan dalam satu tahun	18 Unit 12 Bulan	12.780.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah sarana dan Prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab	1 Paket	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah pekerjaan rehab berat gedung kantor	1 Unit 1 Paket	65.864.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Paket		Tidak di anggarkan pada tahun 2023
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase PSKS yang diberdayakan	95%	2.113.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase PSKS yang diberdayakan	95%	1.098.221.900	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten	95%	2.113.000.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten	95%	1.098.221.900	

Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Manusia PSM dan pemilihan pilar-pilar berprestasi	81 orang PSM	400.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Manusia PSM	81 Orang 81 PSM	251.670.000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia TKSK dan pemilihan pilar-pilar berprestasi	13 orang TKSK	150.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pemilihan TKSK berprestasi Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia TKSK Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kali 13 TKSK 13 Orang	86.944.000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana PPKS, Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat (RTLH) pengadaan Bangunan Warbinsos, Jumlah Pemberian Bantuan UEP Fakir Misikn dan UEP KUBE	25 RTLH, 1 kali sosialisasi, 1 unit warbinsos, 50 KPM dan 5 klp	525.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Bantuan UEP-FM Jumlah Bantuan UEP-KUBE Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana PMKS (RTLH) Jumlah Sosialisasi RTLH Jumlah Sosialisasi UEP-FM Pertemuan Kelompok UEP-KUBE	38 paket 2 kelompok 80 Keluarga 22 RTLH 1 kali 1 kali 4 kali	629.103.000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Karang Taruna mengikuti sosialisasi dan lomba karang taruna dan jumlah PPKS kelembagaan masyarakat yang diberdayakan	80 karang taruna, 11 LKS, 1 LKKS, sosialisasi dan musda LKKS	918.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Karang Taruna yang mengikuti sosialisasi Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Sosialisasi tentang Peran dan Fungsi LKKS	95 Orang 2 Lembaga 1 Kali	130.504.900	
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Sosial dan Penyerahan Bantuan untuk Masyarakat	1 Sosialisasi, 10 Orang Bantaun	120.000.000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Sosial dan Penyerahan Bantuan untuk Masyarakat	0		- Kegiatan pada sub Kegiatan ini telah digabung dengan Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	25%	75.000.000	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	0		-

Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	25%	75.000.000	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	0	-	
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	1 orang	75.000.000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	0	-	Tidak dianggarkan tahun 2023 karena data warga negara migran korban kekerasan belum ada
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	85%	4.127.000.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	85%	2.034.752.800	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	85%	3.417.000.000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	85%	1.888.907.900	
Penyediaan Permakanan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Bantuan Permakanan bagi Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial serta UEP bagi Lansia	2000 Orang Permakanan Lansia dan 30 orang UEP Lansia	2.200.000.000	Penyediaan Permakanan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah bantuan permakanan lansia terlantar dan lansia tidak potensial Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1888 Orang 1888 Orang	1.442.050.900	
Penyediaan Sandang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Bantuan Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar dan Bayi terlantar	100 Orang	180.000.000	Penyediaan Sandang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Anak Terlantar Jumlah Bantuan Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar Jumlah Bayi Terlantar Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang 40 Orang 5 Orang 75 Orang	95.900.000	
Penyediaan Alat Bantu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Alat Bantu cacat bagi Lansia	85 Orang	240.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pemberian Alat Bantu Cacat bagi Lansia	75 Orang 75 Orang	64.000.000	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	60 Kasus ABH/Anak Terlantar	72.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	50 Orang 50 kasus	30.000.000	

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pelatihan, Pelayanan dan Bantuan UEP bagi Penyandang Disabilitas dan Tersedianya Rumah Idaman/UJLS/Rumah Hantara/Rumah Singgah	50 Orang dan 1 Unit Rumah Singgah	250.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Bantuan UEP bagi penyandang disabilitas Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Orang 23 Orang	141.500.000	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	25 Orang	150.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang	45.000.000	
Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pelatihan bagi anak terlantar dan putus sekolah dan pengiriman anak ke panti rehabilitasi dan bimbingan lanjut untuk anak terlantar (putus sekolah)	80 Orang	150.000.000	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pengiriman anak terlantar/putus sekolah ke panti rehabilitasi sosial	32 Orang 32 Orang	25.000.000	
Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	5 Orang	25.000.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	0	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2023
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5 Orang	25.000.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	0	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2023
Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pengiriman Penyandang Disabilitas ke Panti Rehabilitasi	30 Orang	125.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pengiriman penyandang disabilitas ke panti rehabilitasi penyandang disabilitas	15 Orang 15 Orang	45.457.000	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial		Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	85%	710.000.000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial		Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	85%	145.844.900	
Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	10 Orang	25.000.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	0	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2023
Penyediaan Permakanan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Permakanan	30 Orang	25.000.000	Penyediaan Permakanan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Permakanan	0	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2023

Penyediaan Sandang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Sandang	30 Orang	25.000.000	Penyediaan Sandang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Sandang	0	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2023
Penyediaan Alat Bantu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Alat Bantu	15 Orang	25.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Alat Bantu	0	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2023
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	10 Orang	25.000.000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	0	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2023
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan bantuan UEP dan bimbingan lanjut untuk wanita tuna susila	25 Orang	250.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah bantuan UEP bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang 10 Orang	59.775.000	
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	10 Orang	25.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	0	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2023
Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Lima Puluh Kota	Validasi Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional, PBI, JKSS, PBI Jamkesda dan PBI JKN APBD Serta Sosialisasi.	Jamkesda 18.500, PBI JKN 176.017 Jiwa, PBI JKSS 17.874 Jiwa	175.000.000	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses keLayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Validasi Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional JKN Validasi Penerima Bantuan PBI JKSS	194763 Orang 170.052 Jiwa 17.784 Jiwa	71.069.900	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10 Orang	25.000.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	0	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2023
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	10 Orang	25.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2023
Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Layanan Rujukan	10 Orang	25.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Layanan Rujukan	0	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2023

Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Panti di Kabupaten Lima Puluh Kota dan jumlah tenaga pembina anak terlantar yang mengikuti bimbingan teknis.	9 Panti 25 orang	60.000.000	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Monitoring dan Evaluasi Panti di Kabupaten Lima Puluh Kota	9 Dokumen 9 Panti	15.000.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Jumlah Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	85%	1.690.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Jumlah Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	85%	786.746.600	
Pemeliharaan Anak Terlantar		Persentase Pemeliharaan Anak Terlantar	85%	140.000.000	Pemeliharaan Anak Terlantar		Persentase Pemeliharaan Anak Terlantar			
Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	17 orang	35.000.000	Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	0		- Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2023
Rujukan Anak - Anak Terlantar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rujukan Anak - Anak Terlantar	20 orang	55.000.000	Rujukan Anak - Anak Terlantar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rujukan Anak - Anak Terlantar	0		- Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2023
Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	25 orang	50.000.000	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	0		- Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2023
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	95%	1.550.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	95%	786.746.600	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data DTKS serta Pendataan PMKS dan PSKS	13 Kecamatan	400.000.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	257838 Orang	226.805.600	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP) Sembako	24.994 KPM	150.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP) Sembako	0		- Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2023
Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Monitoring Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	16.898 orang KPM	350.000.000	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Monitoring Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	53938 Keluarga 18 Orang KPM	189.192.300	
Fasilitasi Bantuan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) serta Bantuan UEP untuk KTK dan WRSE	25 KTK, 25 WRSE dan 50 Bantuan UEP	650.000.000	Fasilitasi Bantuan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Bantuan UEP bagi KTK dan WRSE Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Pelatihan dan pemberian bantuan barang bagi Korban Tindak Kekerasan(KTK) Pelatihan dan pemberian bantuan barang bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	50 Orang 100 Orang 25 Orang 25 Orang	370.748.700	

PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Korban Bencana yang Tertangani	100%	471.000.000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Korban Bencana yang Tertangani	100%	128.509.800	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten	95%	271.000.000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten	95%	84.382.700	
Penyediaan Makanan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Makanan untuk Korban Bencana dan Pembangunan Gudang Logistik	150 Paket	100.000.000	Penyediaan Makanan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah penyediaan makanan untuk korban bencana Pembangunan Gudang Logistik	173 Orang 150 Paket 1 Paket	67.332.700	
Penyediaan Sandang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Sandang untuk Korban Bencana	150 Paket	95.000.000	Penyediaan Sandang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Sandang untuk Korban Bencana	0	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2023 karena keterbatasan anggaran
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1 Unit	50.000.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	0	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2023 karena keterbatasan anggaran
Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan Mayat terlantar dan orang terlantar dalam perjalanan	2 orang mayat terlantar dan 10 orang terlantar dalam perjalanan	15.000.000	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah orang terlantar dalam perjalanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah penanganan khusus bagi kelompok rentan	16 Orang 8 Orang 2 mayatterlantar	9.300.000	
Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penggantian Transportasi Tagana dan selter pengungsi	82 Orang Tagana	11.000.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Penggantian Transportasi Tagana	38 Orang 25 Orang Tagana	7.750.000	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase Terbentuknya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	95%	200.000.000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase Terbentuknya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	95%	44.127.100	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sosialisasi untuk Tagana dan Masyarakat rawan Bencana	1 Sosialisasi 1 Kampung Siaga Bencana	100.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Sosialisasi untuk Anggota Tagana dan Masyarakat	25 Orang 1 Sosialisasi	44.127.100	

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dan Perekrutan Tagana Muda	25 orang	100.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dan Perekrutan Tagana Muda	0	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2023 karena keterbatasan anggaran
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Terkelolanya Makam Pahlawan	95%	180.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Terkelolanya Makam Pahlawan	95%	85.113.100	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	95%	180.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	95%	85.113.100	
Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rehab Sarana dan Prasarana Makam Pahlawan dan Peringatan Hari Pahlawan 10 November	1 Rehab dan 1 Kali Peringatan	110.000.000	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Rehab Makam Pahlawan Peringatan Hari Pahlawan 10	1 Dokumen 1 Rehab 1 Kali Peringatan	67.113.100	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Makam	50.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Makam	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2023 karena keterbatasan anggaran
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah hari kerja THL yang dibayarkan	12 Bulan	20.000.000	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Bulan Kerja Tenaga Kontrak (Tenaga Keamanan Makam Pahlawan) yang dibayarkan Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Bulan 12 Laporan	18.000.000	
		Total		16.492.411.000			Total		8.552.013.305	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung hasil usulan para pemangku kepentingan. Terkait dengan usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat. Mulai dari Musrenbang Nagari, Kecamatan sampai dengan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten maupun Forum OPD Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Sosial berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam kesempatan Musrenbang tahun 2023, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan ada yang diarahkan secara khusus untuk Dinas Sosial. Tetapi ada satu hal penting yang disampaikan masyarakat bahwa Dinas Sosial harus mampu menyusun suatu perencanaan pembangunan yang betul-betul merupakan hasil dari suatu kajian yang serius terhadap kebutuhan riil masyarakat, jangan hanya memenuhi keinginan dan kepentingan elit atau satu kelompok saja dan mengabaikan kepentingan kelompok lain atau masyarakat luas.

Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius Dinas Sosial dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Sosial dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien. Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2023 disajikan pada tabel II.5 berikut :

Tabel II.6 (T-C.32.)					
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023					
Kabupaten Lima Puluh Kota					
Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial					
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
MUSRENBANG					
1	Program : Pemberdayaan Sosial				
	Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				
a	Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Pemberian Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) FM bagi Fakir Miskin	9 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
			Pemberian Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Fakir Miskin	1 Kelompok	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
2	Program : REHABILITASI SOSIAL				
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
a	Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Pemberian Bantuan Sosial Permakanan bagi Lansia terlantar dan lansia tidak potensial	429 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
			Pemberian Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi lansia terlantar potensial	15 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
b	Sub Kegiatan : Penyediaan Sandang	Kabupaten Lima Puluh Kota	Pemberian Bantuan Sosial Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar, anak terlantar dan Bayi Terlantar	10 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
c	Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	Pemberian bantuan sosial Alat Bantu Cacat bagi penyandang disabilitas	10 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
d	Sub Kegiatan : Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kabupaten Lima Puluh Kota	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Anak Terlantar / Anak Putus Sekolah yang telah kembali mengikuti pelatihan di Balai Rehabilitasi Sosial	5 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
3	Program : PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
a	Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Kabupaten Lima Puluh Kota	Pemberian bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi KTK dan WRSE dan Pelatihan dan pemberian bantuan barang bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Korban Tindak Kekerasan (KTK)	40 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah

POKOK PIKIRAN DPRD					
1	Program : PEMBERDAYAAN SOSIAL				
	Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				
a	Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Pemberian Bantuan Sosial Barang Usaha Ekonomi Produktif (UEP) FM bagi Fakir Miskin	26 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
			Pemberian Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Fakir Miskin	9 Kelompok	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
2	Program : REHABILITASI SOSIAL				
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
a	Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Pemberian Bantuan Sosial Permakanan bagi Lansia terlantar dan lansia tidak potensial	849 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
			Pemberian Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi lansia terlantar potensial	20 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
b	Sub Kegiatan : Penyediaan Sandang	Kabupaten Lima Puluh Kota	Pemberian Bantuan Sosial Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar, anak terlantar dan Bayi Terlantar	10 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
c	Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	Pemberian bantuan sosial Alat Bantu Cacat bagi penyandang disabilitas	15 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
			Pemberian bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi penyandang disabilitas	12 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
d	Sub Kegiatan : Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kabupaten Lima Puluh Kota	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Anak Terlantar / Anak Putus Sekolah yang telah kembali mengikuti pelatihan di Balai Rehabilitasi Sosial	12 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
3	Program : PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
	Kegiatan :Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
a	Sub Kegiatan :Fasilitasi Bantuan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Kabupaten Lima Puluh Kota	Pemberian bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi KTK dan WRSE dan Pelatihan dan pemberian bantuan barang bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Korban Tindak Kekerasan (KTK)	101 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran

Pada tabel II.5 usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2023 yaitu pada forum Musrenbang Kecamatan adalah Program : Pemberdayaan Sosial, Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja : Pemberian Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) FM bagi Fakir Miskin sebanyak 9 orang dan Pemberian Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Fakir Miskin sebanyak 1 kelompok. Program : Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan, dengan indikator kinerja Pemberian Bantuan Sosial Permakanan bagi Lansia terlantar dan lansia tidak potensial sebanyak 429 Orang dan Pemberian Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi lansia terlantar potensial sebanyak 15 orang, Sub Kegiatan : Penyediaan Sandang dengan indikator kinerja Pemberian Bantuan Sosial Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar, anak terlantar dan Bayi Terlantar sebanyak 10 orang, Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial dengan indikator kinerja : Pemberian bantuan sosial Alat Bantu Cacat bagi penyandang disabilitas 10 Orang, Sub Kegiatan : Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar indikator kinerja adalah pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Anak Terlantar / Anak Putus Sekolah yang telah kembali mengikuti pelatihan di Balai Rehabilitasi Sosial sebanyak 5 Orang Program : Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Pembangunan Ekonomi Masyarakat, indikator kinerja Pemberian bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi KTK dan WRSE dan Pelatihan dan pemberian bantuan barang bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Korban Tindak Kekerasan (KTK) 40 Orang. Dari data yang diusulkan yang dilayakkan dalam musrenbang Kecamatan ini akan terealisasi sesuai dengan kemampuan anggaran/ keuangan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023.

Usulan Pokok- Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 usulan yang layak adalah pada Program : Pemberdayaan Sosial, Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja : Pemberian Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) FM bagi Fakir Miskin sebanyak 26 orang dan Pemberian Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Fakir Miskin sebanyak 9 kelompok. Program : Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan, dengan indikator kinerja Pemberian Bantuan Sosial Permakanan bagi Lansia terlantar dan lansia tidak potensial sebanyak 849 Orang dan Pemberian Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi lansia terlantar potensial sebanyak 20 orang, Sub Kegiatan : Penyediaan Sandang dengan indikator kinerja Pemberian Bantuan Sosial Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar, anak terlantar dan Bayi Terlantar sebanyak 10 orang, Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial dengan indikator kinerja : Pemberian bantuan sosial Alat Bantu Cacat bagi penyandang disabilitas 15 Orang, dan Pemberian bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi penyandang disabilitas sebanyak 12 Orang, Sub Kegiatan : Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar indikator kinerja adalah pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Anak Terlantar / Anak Putus Sekolah yang telah kembali mengikuti pelatihan di Balai Rehabilitasi Sosial sebanyak 12 Orang. Program : Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Pembangunan Ekonomi Masyarakat, indikator kinerja Pemberian bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi KTK dan WRSE dan Pelatihan dan pemberian bantuan barang bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Korban Tindak Kekerasan (KTK) 40 Orang. Dari data yang diusulkan yang dilayakkan dalam pokok pikiran DPRD ini akan terealisasi sesuai dengan kemampuan anggaran/ keuangan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2023.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan Pembangunan Nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi dan Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJMN 2020-2024 yaitu :

Visi :

“ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong “

Misi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan Rasa Aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Rangka Negara Kesatuan.

5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Presiden di RPJMN, ke lima arahan tersebut mencakup :

1. Pembagunan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Arahan utama RPJMN 2020-2024 untuk Dinas Sosial pada arahan pertama yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), strategi pembangunan SDM adalah Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial yang terdiri dari :

1. Tata Kelola Kependudukan
2. Perlindungan Sosial
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Pengentasan Kemiskinan
6. Kualitas anak, perempuan dan Pemuda.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial (Renstra Dinas Sosial) Tahun 2021-2026, maka telah ditetapkan di dalam Renstra tersebut Visi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 yaitu :

a. Pernyataan Visi

“Mewujudkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Mandiri dan Bermartabat ”

Merujuk kepada visi tersebut lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

b. Mandiri adalah keadaan dapat berdiri sendiri tidak bergantung kepada orang lain.

PPKS Mandiri adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar tanpa tergantung kepada orang lain.

c. Bermartabat adalah Seseorang yang memiliki kehormatan, kemuliaan, gengsi, marwah, kewibawaan dan nama baik yang setara dan sederajat dengan orang lain dan lingkungannya

d. Pernyataan Misi di susun sebagai berikut :

1. Meningkatkan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial , perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

2. Meningkatkan profesionalisme Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pemenuhan kebutuhan dasar pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
3. Membangun kepedulian sosial seseorang, keluarga, masyarakat, pelaku usaha dan pihak ketiga lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

e. Tujuan dan sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan :

- Meningkatnya Pelayanan Prima dan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- Meningkatnya Profesionalisme Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- Meningkatkan Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- Tersalurnya bantuan sosial yang tepat guna dan tepat sasaran
- Membangun kepedulian sosial seseorang, keluarga, masyarakat, pelaku usaha dan pihak ketiga lainnya.

2. Sasaran

- Meningkatkan Pelayanan Pemenuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- Peningkatan Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

- Meningkatkan penyaluran bantuan bagi KK atau Masyarakat yang tertimpa bencana
- Meningkatnya jumlah seseorang yang memiliki semangat kepedulian.

Sasaran Program Urusan Sosial

- *Kemiskinan*, meliputi kelompok warga yang karena sesuatu hal baik karena faktor internal individu maupun faktor eksternal individu mengakibatkan ketidakmampuan sosial ekonomi atau rentan menjadi miskin yakni: (1) keluarga fakir miskin; (2) dan wanita rawan sosial ekonomi.
- *Keterlantaran*, meliputi warga masyarakat yang karena sesuatu hal mengalami keterlantaran fisik, mental dan sosial yakni: (1) balita terlantar, (2) anak remaja terlantar, termasuk anak jalanan dan pekerja anak, (3) keluarga bermasalah sosial psikologis, dan (4) lansia terlantar
- *Kecacatan*, meliputi warga masyarakat yang mengalami kecacatan sehingga terganggu fungsi sosialnya, yakni: (1) tuna daksa, (2) tuna netra, (3) tuna rungu/wicara, (4) tuna grahita, dan (5) cacat ganda
- *Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku*, meliputi warga masyarakat yang mengalami gangguan fungsi-fungsi sosialnya akibat ketidakmampuannya mengadakan penyesuaian (*social adjustment*) secara normatif, yakni: (1) tindak tuna susila, (2) anak konflik dengan hukum/ nakal, (3) eks warga binaan, (4) korban narkoba, (5) gelandangan; (6) pengemis dan (7) korban HIV/AIDS dan (8) eks penyakit kronis terlantar.
- *Akibat Bencana*, meliputi warga masyarakat yang mengalami musibah atau bencana, yakni: (1) korban bencana alam, dan (2) korban bencana sosial yang disebabkan oleh konflik sosial dan kemajemukan latar belakang sosial budaya.
- *Korban Tindak Kekerasan* meliputi warga masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, seperti: (1) anak yang dilacurkan, diperdagangkan dan bekerja dalam situasi terburuk (2) wanita korban tindak kekerasan, (3) lanjut usia korban tindak kekerasan, dan (4) pekerja migran korban tindak kekerasan.

- Potensi dan sumber kesejahteraan sosial meliputi: (1) Pekerja Sosial Profesional (2) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) (3) Taruna Siaga Bencana (TAGANA) (4) Keluarga Pioner (5) Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (6) Penyuluh Sosial (7) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (8) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) (9) Karang Taruna (10) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) (11) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) (12) Dunia Usaha

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Sosial

Penetapan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial untuk Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2023 mengacu kepada program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam Renstra Dinas Sosial tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Dinas Sosial dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu program dan kegiatan pada setiap SKPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan bidang Sosial. Ringkasan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 3.3.1

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

A.	PROGRAM	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
1.	Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

	Sub Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2.	Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3.	Kegiatan	:	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4.	Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangun Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.	Kegiatan	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Sub Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

			2. Pengadaan Mebel 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.	Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.	Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 1 Program 7 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan.

Tabel 3.3.2

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintah Bidang Sosial

A.	PROGRAM	:	PEMBERDAYAAN SOSIAL
1.	Kegiatan	:	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan	:	1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota 3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota 4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota

B.	PROGRAM	:	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1.	Kegiatan	:	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial
	Sub Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penyediaan Alat Bantu 4. Pemberian Pelayanan Reunifikasikan Keluarga 5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial 6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis dan Masyarakat 7. Pemberian Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan dasar 8. Pemberian Layanan Rujukan
2.	Kegiatan	:	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial
	Sub Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial 2. Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar 3. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota
C.	PROGRAM	:	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1.	Kegiatan	:	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
	Sub Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
D.	PROGRAM	:	PENANGANAN BENCANA
1.	Kegiatan	:	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

	Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan Makanan 2. Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan 3. Pelayanan Dukungan Psikososial
2.	Kegiatan	:	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan	:	1. Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana
E.	PROGRAM	:	PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
1.	Kegiatan	:	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan	:	1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 2. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota

Jumlah Urusan Pemerintah Bidang Sosial 5 Program 7 Kegiatan 24 Sub Kegiatan.

Berdasarkan tabel diatas maka tahun 2023 Dinas Sosial melaksanakan 6 Program, 14 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan. Program dan kegiatan tersebut merupakan kegiatan pendukung dari pencapaian IKU, IKD, SDG'S, PUG dan SPM Dinas Sosial.

Program yang mendukung Indikator Kinerja Utama adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Program Bencana. Program pendukung PUG adalah Program Pemberdayaan Sosial dan Program Rehabilitasi Sosial.

T-B.36

Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas

Kabupaten Lima Puluh Kota

(Analisa data capaian kinerja tahun 2021)

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jumlah warga Negara /Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di luar panti	Sesuai		<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Gelandangan dan Pengemis di luar panti 2. Pemberian bimbingan sosial kepada Gelandangan dan pengemis 3. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi gelandangan dan pengemis
2.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Sesuai		<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Korban Bencana 2. Ketersediaan bantuan sandang dan pangan

Pada tahun 2021, indikator kinerja dapat dicapai sesuai dengan target kinerja contohnya pada pelayanan SPM, pada indikator 1 Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dengan target 38 terealisasi 38. Indikator 2 Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dengan target 84 terealisasi 84. Indikator 3 Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dengan target 2.105 terealisasi 2.004. Indikator 4 Jumlah warga Negara /Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti dengan target 0 realisasi 0, pada indikator 4 ini tidak ada target karena belum adanya data gelandangan dan pengemis yang valid atau yang layak yang benar-benar harus diberikan pemenuhan kebutuhan. Indikator 5 Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial dengan target 1.265 terealisasi 1265.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan untuk indikator 4 adalah Data Gelandangan dan Pengemis di luar panti, Pemberian bimbingan sosial kepada Gelandangan dan pengemis dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi gelandangan dan pengemis

Indikator untuk pencapaian kinerja pada Indikator Kinerja daerah (IKD) ada 8 (delapan) salah satunya adalah Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat, Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Data Korban Bencana dan Ketersediaan bantuan sandang dan pangan.

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.00 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.00 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											8,552,013,305		10,570,101,100		
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											4,418,669,105		5,352,984,000	
1	06	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											42,367,000		41,000,000
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Renstra dan Renja	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	2 Dokumen 2 Dokumen	95 %	17,204,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	9,000,000
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah RKA	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 Dokumen 1 Dokumen	95 %	2,351,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	2,500,000
1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah RKA Perubahan	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 Dokumen 1 Dokumen	95 %	2,351,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	2,500,000
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah DPA	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 Dokumen 1 Dokumen	95 %	2,351,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	2,500,000
1	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah DPA Perubahan	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 Dokumen 1 Dokumen	95 %	1,951,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	2,500,000
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP, SPIP,LKPI, EKPPD, LPPD, Penetapan Kinerja, RKT, Rencana Aksi, Realisasi Rencana Aksi, SPM dan Laporan Capaian Kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	12 Dokumen 12 Laporan	95 %	11,159,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	15,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 06 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah OH yang melaksanakan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan APBD	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	9 Laporan 54 OH	95 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	7,000,000
1 06 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,483,406,063					4,014,000,000
1 06 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan Laporan OPD	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	37 Orang/bulan 12 Bulan	95 %	3,473,531,063	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	4,000,000,000
1 06 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen SPI dan Jumlah SPI kegiatan yang di Verifikasi	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan Laporan OPD	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	12 Dokumen 12 Bulan	95 %	2,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	4,500,000
1 06 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan Laporan OPD	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 Dokumen 1 Laporan	95 %	2,389,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	3,000,000
1 06 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan Laporan OPD	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	12 Laporan 12 Dokumen	95 %	2,855,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	4,000,000
1 06 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis dan Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan Laporan OPD	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 Dokumen 1 Dokumen	95 %	1,951,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	2,500,000
1 06 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								4,176,000					6,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 06 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah RKBMD dan RKBPMMD	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	2 Dokumen 2 Dokumen	95 %	1,985,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	2,500,000
1 06 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	3 Laporan 3 Dokumen	95 %	2,191,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	3,500,000
1 06 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								194,417,680					263,500,000
1 06 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah alat listrik yang diadakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	12 Paket 12 Paket	95 %	5,999,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	8,000,000
1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan alat kebersihan yang diadakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	12 Paket 12 Bulan	95 %	41,673,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	40,000,000
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	12 Bulan 12 Paket	95 %	30,260,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	40,000,000
1 06 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pembayaran bahan bacaan dan surat kabar Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	12 Bulan 12 Dokumen	95 %	4,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	5,500,000
1 06 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah porsi makan minum tamu yang disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	24 Laporan 1093 Porsi	95 %	17,197,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	20,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah Porsi makan minum rapat	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	24 Laporan 89 OH 525 Porsi	95 %	94,337,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	150,000,000
1 06 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								128,617,362					243,794,000
1 06 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Kendaraan Roda 2 (dua)	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	3 Unit 3 Unit	95 %	43,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	115,344,000
1 06 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Lemari Arsip	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	3 Unit 3 Unit	95 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	25,000,000
1 06 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Laptop	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	2 Unit 2 Unit	95 %	70,492,362	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	103,450,000
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								277,850,000					354,690,000
1 06 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan surat menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	4 Laporan 12 Bulan	95 %	1,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	4,690,000
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	12 Laporan 12 Bulan	95 %	41,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	50,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Honor pengurus Barang Pegguna Jumlah bulan gaji PTT Jumlah bulan gaji THL Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	12 Bulan 13 Bulan 12 Bulan 24 Laporan	95 %	235,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	300,000,000
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							287,835,000					430,000,000	
1 06 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	12 Bulan 15 Unit	95 %	209,191,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	312,000,000
1 06 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Rata-rata perbaikan peralatan kantor yang dilakukan dalam satu tahun	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	18 Unit 12 Bulan	95 %	12,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	18,000,000
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah pekerjaan rehab berat gedung kantor	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 Unit 1 Paket	95 %	65,864,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	100,000,000
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							1,098,221,900					1,568,093,100	
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota							1,098,221,900					1,568,093,100	
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang di Berdayakan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Manusia PSM	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	81 Orang 81 PSM	95 %	251,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PSKS yang di Berdayakan	95 %	277,450,000

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang di Berdayakan	Jumlah pemilihan TKSK berprestasi Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia TKSK Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 Kali 13 TKSK 13 Orang	95 %	86,944,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PSKS yang di Berdayakan	95 %	100,000,000
1 06 02 2.03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang di Berdayakan	Jumlah Bantuan UEP-FM Jumlah Bantuan UEP-KUBE Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana PMKS (RTLH) Jumlah Sosialisasi RTLH Jumlah Sosialisasi UEP-FM Pertemuan Kelompok UEP-KUBE	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	38 paket 2 kelompok 80 Keluarga 22 RTLH 1 kali 1 kali 4 kali	95 %	629,103,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PSKS yang di Berdayakan	95 %	732,000,000
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang di Berdayakan	Jumlah Karang Taruna yang mengikuti mengikuti sosialisasi Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Sosialisasi tentang Peran dan Fungsi LKKS	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 Orang 2 Lembaga 1 Kali	95 %	130,504,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PSKS yang di Berdayakan	95 %	308,643,100
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								2,034,752,800					2,410,500,000
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								1,888,907,900					2,255,500,000
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah bantuan permakanan lansia terlantar dan lansia tidak potensial Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	1888 Orang 1888 Orang	85 %	1,442,050,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	85 %	1,700,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Anak Terlantar Jumlah Bantuan Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar Jumlah Bayi Terlantar Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	30 Orang 40 Orang 5 Orang 75 Orang	85 %	95,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	85 %	150,000,000
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pemberian Alat Bantu Cacat bagi Lansia	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	75 Orang 75 Orang	85 %	64,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	85 %	75,000,000
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	50 Orang 50 kasus	85 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	85 %	35,000,000
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Bantuan UEP bagi penyandang disabilitas Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	23 Orang 23 Orang	85 %	141,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	85 %	160,000,000
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	18 Orang	85 %	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	85 %	55,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 06 04 2.01 08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pengiriman anak terlantar/putus sekolah ke panti rehabilitasi sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	32 Orang 32 Orang	85 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	85 %	30,000,000
1 06 04 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pengiriman penyandang disabilitas ke panti rehabilitas penyandang disabilitas	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	15 Orang 15 Orang	85 %	45,457,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	85 %	50,500,000
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								145,844,900					155,000,000
1 06 04 2.02 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah bantuan UEP bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS danNAPZA di Luar Panti Sosial	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	10 Orang 10 Orang	85 %	59,775,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	85 %	65,000,000
1 06 04 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Validasi Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional JKN Validasi Penerima Bantuan PBI JKSS	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS danNAPZA di Luar Panti Sosial	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	194763 Orang 170.052 Jiwa 17.784 Jiwa	85 %	71,069,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	85 %	75,000,000
1 06 04 2.02 14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Monitoring dan Evaluasi Panti di Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS danNAPZA di Luar Panti Sosial	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	9 Dokumen 9 Panti	85 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	85 %	15,000,000
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								786,746,600					902,524,000
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								786,746,600					902,524,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Persentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	257838 Orang	95 %	226,805,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	85 %	271,185,600
1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	53938 Keluarga 18 Orang KPM	95 %	189,192,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	85 %	159,338,400
1 06 05 2.02 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bantuan UEP bagi KTK dan WRSE Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Pelatihan dan pemberian bantuan barang bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) Pelatihan dan pemberian bantuan barang bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Persentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	50 Orang 100 Orang 25 Orang 25 Orang	95 %	370,748,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	85 %	390,000,000
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA								128,509,800					230,000,000
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								84,382,700					130,000,000
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Persentase Korban Bencana Yang Tertangani	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah penyediaan makanan untuk korban bencana Pembangunan Gudang Logistik	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	173 Orang 150 Paket 1 Paket	95 %	67,332,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Korban Bencana Yang Tertangani	100 %	100,000,000

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 06 06 2.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase Korban Bencana Yang Tertangani	Jumlah orang terlantar dalam perjalanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah penanganan khusus bagi kelompok rentan	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	16 Orang 8 Orang 2 mayat terlantar	95 %	9,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Korban Bencana Yang Tertangani	100 %	20,000,000
1 06 06 2.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase Korban Bencana Yang Tertangani	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Penggantian Transportasi Tagana	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	38 Orang 25 Orang Tagana	95 %	7,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Korban Bencana Yang Tertangani	100 %	10,000,000
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota								44,127,100					100,000,000
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Tertangani	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Sosialisasi untuk Anggota Tagana dan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang 1 Sosialisasi	95 %	44,127,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Korban Bencana Yang Tertangani	100 %	100,000,000
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								85,113,100					106,000,000
1 06 07 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								85,113,100					106,000,000
1 06 07 2.01 01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Makam Pahlawan yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Rehab Makam Pahlawan Peringatan Hari Pahlawan 10 November	Persentase Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 Dokumen 1 Rehab 1 Kali Peringatan	95 %	67,113,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Makam Pahlawan yang Terkelola dengan Baik	95 %	86,000,000
1 06 07 2.01 03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Makam Pahlawan yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Bulan Kerja Tenaga Kontrak (Tenaga Keamanan Makam Pahlawan) yang dibayarkan Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	12 Bulan 12 Laporan	95 %	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Makam Pahlawan yang Terkelola dengan Baik	95 %	20,000,000
TOTAL									8,552,013,305					10,570,101,100

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

4.1 Rencana Kinerja Dinas Sosial

Tabel IV.1
Rencana Target Kinerja IKU KD/IKU OPD

No	Sasaran	Indikator	Target		Ket
			2023	2024	
1	Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	74	76	IKU
2	Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	95	95	IKU
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	65	65	IKU
		Nilai IRB	16,75	17,00	IKU
		Nilai IKM	85	85	IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial ada 3 Sasaran yaitu Satu: Meningkatkan Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk Tahun 2023 targetnya 74 %. PMKS terdiri dari Lanjut Usia terlantar, Eks Narapidana, Disabilitas, Fakir Miskin, Kelompok Usaha Bersama, Anak Terlantar dan Putus Sekolah, Wanita Korban Tindak Kekerasan (KTK), Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Korban Bencana. Dua : Meningkatkan Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan indikator Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang

Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pada sasaran ini di targetkan 95 % untuk Tahun 2022 yang di Nilai Peran aktif semua PSKS yang ada. Tiga : Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah, target tahun 2023 nilai AKIP 65, Nilai IRB 16,75 dan Nilai IKM 85, nilai ini adalah nilai dari Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rencana Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023

Tabel IV.2

Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Daerah	Indikator	Target		Ket
			2023	2024	
	SOSIAL				
1.		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	86,6	88,2	
2.		Persentase PMKS yang tertangani	94,3	95,2	
3.		Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	93,6	93,8	
4.		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	98	98	
5.		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	98	98	
6.		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah	64	65	

		menerima jaminan sosial			
7.		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	7,6	7,6	
8.		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100	100	

Pada Tahun 2022 Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Daerah Dinas Sosial yaitu urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan Sosial yang terdapat didalam RPJMD Bab VIII.

4.2 Pendanaan

Untuk pendanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial pada Tahun 2023, berasal dari dana APBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Uraian kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2023 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel IV.3

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kategori Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	06						8,552,013,385						16,570,161,100		
1	06	01						4,418,669,105				95 %	5,352,984,000		
1	06	01	2.01					42,367,000				95 %	41,000,000		
1	06	01	2.01	01				17,704,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perencanaan, Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen 2 Dokumen	8,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.01	02				2,451,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen	2,500,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.01	03				2,351,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen	2,500,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.01	04				2,351,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen	2,500,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.01	05				1,951,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen	2,500,000	DINAS SOSIAL

Kode	Unsur/ Bidang Unsur/ Program/ kegiatan/ sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Preliminary Capaian Target RKPD tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kategori Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKIP, SPI (LIR, EIRPD, LRPD, Penetapan Kinerja, RKT, Rencana Aksi, Realisasi Rencana Aksi, SPM dan Laporan Capaian Kinerja) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD				12 Dokumen 12 Laporan	11.152.000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen 12 Laporan	11.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah OH yang melaksanakan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan APBD				9 Laporan 54 OH	5.000.000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan 54 OH	7.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan pengelolaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan Laporan OPD	%		%	95 %	3.483.406.063						95 %	4.014.000.000	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan 12 Bulan	3.473.531.063	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	37 Orang/bulan 12 Bulan	4.000.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Peratausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Peratausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen SPK dan Jumlah SPK kegiatan yang di Verifikasi				12 Dokumen 12 Bulan	2.650.000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Dokumen 12 Bulan	4.500.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen 1 Laporan	1.300.000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen 1 Laporan	3.000.000	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Rencana RPJMD	Realisasi Capaian RPJMD Tahun 2021	Pencapaian Capaian Target RPJMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kategori Sifat	Pencapaian Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Page Indikator	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Page Indikator		
										Nasional					Daerah
1.06.01.2.03.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan neraca/ laporan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				12 Laporan 12 Dokumen	2.855,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Hibah/ Bantuan			0	12 Laporan 12 Dokumen	4,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.03.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Managemen dan Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen 1 Dokumen	1.951,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen 1 Dokumen	2,500,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Perentase administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	%	95 %	95 %	4.175,000						95 %	6.000,000	
1.06.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah RKMMD dan RKRPMMD				2 Dokumen 2 Dokumen	1.985,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen 2 Dokumen	2,500,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD				3 Laporan 3 Dokumen	2.151,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan 3 Dokumen	3,500,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	%	95 %	95 %	196.417,680						95 %	263.500,000	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik yang diadakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan				12 Paket 12 Paket	1.000,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Paket 12 Paket	1.000,000	DAERAH OHSIA
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang diadakan Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan alat kebersihan yang diadakan				12 Paket 12 Ruban	41.673,480	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Hibah/ Bantuan	Pembiayaan dan Peningkatan Efisiensi Anggaran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Paket 12 Ruban	40,000,000	DINAS SOSIAL	

Kode	Unitas/ Bidang Unitas/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kategori Sasaran	Prakiraan Meja Rencana Tahun 2022		Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	
						Target 2022	Page Realisasi	Indikasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Page Realisasi		
										Nasional					Daerah
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Diodokan				12 Bulan 12 Paket	30.280,700	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administral Umum Perangkit Daerah	12 Bulan 12 Paket	60.000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Sacan dan Penulisan Perundang-undangan	Jumlah bulan pembayaran bahan sacan dan surat labar Jumlah Dokumen Bahan Sacan dan Peraturan Perundang-undangan yang Diodokan				12 Bulan 12 Dokumen	4.590,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administral Umum Perangkit Daerah	12 Bulan 12 Dokumen	5.500,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.08	Rafidat Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Rafidat Kunjungan Tamu Jumlah porsi makan minum tamu yang disediakan				24 Laporan 1000 Porsi	17.187,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat		Administral Umum Perangkit Daerah	24 Laporan 1000 Porsi	30.000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah Porsi makan minum rapat				24 Laporan 80 OH 625 Porsi	94.537,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat		Administral Umum Perangkit Daerah	24 Laporan 80 OH 625 Porsi	190.000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Utusan Pemerintah Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah Penunjang Utusan Pemerintah Daerah	%		%	95%	128.417,960						95%	248.794,000	
1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diodokan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diodokan Kendaraan Roda 2 (otol)				2 Unit 2 Unit	43.125,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Unit 2 Unit	115.344,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Diodokan Lemari Kayu				2 Unit 2 Unit	15.000,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Unit 2 Unit	25.000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diodokan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diodokan Laptop				2 Unit 2 Unit	70.492,960	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Unit 2 Unit	105.480,000	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kategori Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1	06	01	2.00				95 %	277,850,000					65 %	254,690,000	
1	06	01	2.00	01			4 Laporan 12 Bulan	1,090,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jasa Perancang Usulan Pemerintah Daerah	4 Laporan 12 Bulan	4,500,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.00	02			12 Laporan 12 Bulan	41,370,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jasa Perancang Usulan Pemerintah Daerah	12 Laporan 12 Bulan	90,000,000	Daerah Sosial
1	06	01	2.00	04			12 Bulan 14 Bulan 12 Bulan 24 Laporan	225,190,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jasa Perancang Usulan Pemerintah Daerah	12 Bulan 14 Bulan 12 Bulan 24 Laporan	300,000,000	DINAS SOSIAL
4	06	04	3.00				02 %	367,840,000					02 %	438,600,000	
1	06	01	2.00	02			12 Bulan 15 Unit	209,151,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemeliharaan barang milik Daerah	12 Bulan 15 Unit	310,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.00	04			10 Unit 12 Bulan	12,700,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	10 Unit 12 Bulan	10,000,000	DINAS SOSIAL

Kode	Ususan/ Bidang Ususan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Proyeksi Mula Rencana Tahun 2024		Penangket Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 2.09 05	Pembinaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dijalankan/Rehabilitasi Jumlah pekerjaan rehab bersih gedung kantor				1 Unit 1 Paket	55,864,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kecurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pembinaan Bangun Milik Daerah	1 Unit 1 Paket	100,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PKCS yang di Berdayakan	%		%	95 %	1,898,221,900						95 %	1,568,093,100	
1 06 02 2.01	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	%		%	95 %	1,898,221,900						95 %	1,568,093,100	
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewirausahaan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapabilitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewirausahaan Kabupaten/Kota Jumlah Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Manusia PSM				81 Orang 81 PSM	251,970,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kecurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling		Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PKCS)	81 Orang 81 PSM	277,450,000	DINAS SOSIAL
1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewirausahaan Kabupaten/Kota	Jumlah pemilihan TKSK smpresdai Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia TKSK Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Seawakalan Kewirausahaan Kabupaten/Kota yang Meningkat, Kapabilitasnya Kewirausahaan Kabupaten/Kota				1 kali 13 TKSK 13 Orang	86,944,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kecurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pemerkataan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PKCS)	1 kali 13 TKSK 13 Orang	100,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 02 2.03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewirausahaan Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan UEP- TM Jumlah Bantuan UEP- KUBE Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapabilitasnya Kewirausahaan Kabupaten/Kota Jumlah Serani dan Pelayanan PMKS (RTLH) Jumlah Serani/keu RTLH Jumlah Serani/keu UEP- PM Pertemuan Kelompok UEP-KUBE				38 paket 2 kelompok 80 Keluarga 22 RTLH 1 kali 1 kali 4 kali	629,103,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kecurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling		Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PKCS)	38 paket 2 kelompok 80 Keluarga 22 RTLH 1 kali 1 kali 4 kali	732,000,000	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kategori Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokal	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Keajaiban Sosial Kerelaksanaan Masyarakat Keremangan Kabupaten/Kota	Jumlah Karang Taruna yang mengikuti mangkud sosialisasi Jumlah Lembaga Keajaiban Sosial yang Meningkatkan Kemampuan Keremangan Kabupaten/Kota Jumlah Sosialisasi tentang Peran dan Fungsi UKS				95 Orang 2 Lembaga 1 Kali	130,504,900	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pelaksana dan Peningkatan Efisiensi Masyarakat	Potensi Sumber Keajaiban Sosial (PSKS)	95 Orang 2 Lembaga 1 Kali	308,643,100	DINAS SOSIAL
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Penentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	%	%	%	85 %	2,984,752,800						85 %	2,410,580,000	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Partisipatif Sosial	Penentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Partisipatif Sosial	%	%	%	85 %	1,888,987,900						85 %	2,258,580,000	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Pemukiman	Jumlah bantuan pemukiman layak terlantar dan layak tidak potensial Jumlah Orang yang mendapatkan Pemukiman Kebutuhan Pemukiman Sesuai dengan Standar Gaji Minimal Keremangan Kabupaten/Kota				1888 Orang 1888 Orang	1,442,050,900	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pelaksana dan Peningkatan Efisiensi Masyarakat	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terla ntar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandan gan Pengemis di Luar Partis ipatif Sosial	1888 Orang 1888 Orang	1,700,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Anak Terlantar Jumlah Bantuan Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar Jumlah Bayi Terlantar Jumlah Orang yang Menerima Pakelan dan Kebutuhan lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Keremangan Kabupaten/Kota				30 Orang 40 Orang 5 Orang 75 Orang	95,900,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terla ntar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandan gan Pengemis di Luar Partis ipatif Sosial	30 Orang 40 Orang 5 Orang 75 Orang	150,000,000	DINAS SOSIAL

Kode	Unsur/ Bidang Unsur/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kategori Sesaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sosial Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pemberian Alat Bantu Cacat bagi Lelaki				75 Orang 75 Orang	64,000,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Parit Sosial	75 Orang 75 Orang	75,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reabilitasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reabilitasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pemberian pelayanan reabilitasi keluarga				50 Orang 50 kasus	30,000,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Parit Sosial	50 Orang 50 kasus	30,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Bantuan LEP bagi penyandang disabilitas Jumlah Peserta Bimbingan Fik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				23 Orang 23 Orang	141,500,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perilaku dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Parit Sosial	23 Orang 23 Orang	140,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota				10 Orang	45,000,000	Sumua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Parit Sosial	10 Orang	50,000,000	DINAS SOSIAL

Kode	Unsur/ Bidang Unsur/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Rencana RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan					Kelempok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokal	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.06.04.2.01.08	Rehabilitasi Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kecamatan Kabupaten/Kota Jumlah Pengiriman anak terlantar/putas sekolah ke parti rehabilitasi sosial				32 Orang 32 Orang	35.000.000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		32 Orang 32 Orang	35.000.000	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.13	Rehabilitasi Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kesehatan Kabupaten/Kota Jumlah pengiriman penyandang disabilitas ke parti rehabilitasi penyandang disabilitas				15 Orang 15 Orang	45.457.000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		15 Orang 15 Orang	50.500.000	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesehatan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Partai Sosial	Penyembatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesehatan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Partai Sosial	%		%	85 %	148.844.900					85 %	148.844.900		
1.06.04.2.02.07	Rehabilitasi Bimbingan Fisi, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah bentuk UEP bagi Penyandang Masalah Kesehatan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisi, Mental, Spiritual dan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota				10 Orang 10 Orang	59.775.000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Orang 10 Orang	65.000.000	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.02.10	Rehabilitasi Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kecamatan Kabupaten/Kota Yakudai Dana Pembiayaan Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional JKN Widaii Pembiayaan Bantuan PBI JKSS				194763 Orang 170.052 jiwa 17.754 jiwa	71.069.900	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			194763 Orang 170.052 jiwa 17.754 jiwa	75.000.000	DINAS SOSIAL	

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Rangkai Pendanaan						Kelompok Sasaran	Proyeksi Meja Rencana Tahun 2024		Pangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.04.2.02.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Komitmen dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Komitmen dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Monitoring dan Evaluasi Panti di Kabupaten Lima Puluh Kota				9 Dokumen 9 Panti	15,000,000	Kab. Lima Puluh Kota, Serta Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesehatan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan/ATAU di Luar Panti Sosial	9 Dokumen 9 Panti	15,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.05	PROGRAM PERINDOHOAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Pembinaan dan Jaminan Sosial	%		%	81 %	786,746,600						81 %	982,524,900	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	%		%	95 %	786,746,600						95 %	982,524,900	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Update				257838 Orang	226,805,600	Kab. Lima Puluh Kota, Serta Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum		Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Data Fakir Miskin	257838 Orang	271,185,600	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.03	Facilitasi Bantuan Sosial Keluarga Berencana Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Keenambulan Kabupaten/Kota Monitoring Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)				33936 Keluarga 18 Orang KPM	180,192,300	Kab. Lima Puluh Kota, Serta Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum		Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Data Fakir Miskin	33936 Keluarga 18 Orang KPM	195,338,400	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.04	Facilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Bantuan UDF bagi KTK dan WRGE Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Kabupaten/Kota Pelibatan dan pemberian bantuan barang bagi Korban Tsunami Kekerasan (TKK) Pelibatan dan pemberian bantuan barang bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)				60 Orang 100 Orang 25 Orang 25 Orang	330,760,700	Kab. Lima Puluh Kota, Serta Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum			Data Fakir Miskin	60 Orang 100 Orang 25 Orang 25 Orang	380,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Tertangani	%		%	100 %	128,500,000						100 %	238,000,000	

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPJMD Tahun 2021	Prokras Capaian Target RPJMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kemungkinan Penurunan						Kelempok Severan	Prokras Maju Rencana Tahun 2024		Perangkit Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	06	06	2.01			95 %	84,882,700						95 %	100,000,000	
1	06	06	2.01	01		173 Orang 150 Paket 1 Paket	67,330,700	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Korban Bencana Alam dan Sosial	173 Orang 150 Paket 1 Paket	100,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.01	04		16 Orang 8 Orang 2 mayat terlantar	4,900,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Korban Bencana Alam dan Sosial	16 Orang 8 Orang 2 mayat terlantar	30,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.01	05		56 Orang 25 Orang Tagana	2,780,000	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Korban Bencana Alam dan Sosial	56 Orang 25 Orang Tagana	10,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.02			95 %	44,127,100						95 %	100,000,000	
1	06	06	2.02	02		25 Orang 1 Sosialbasi	44,127,100	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkeadilan dan Berdaya Saling		Peningkatan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	25 Orang 1 Sosialbasi	100,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	07				95 %	88,118,180						95 %	100,000,000	

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2023 disusun melalui proses tahapan yang cukup panjang mulai dari Musrenbang Nagari, Musrenbang tingkat Kecamatan dan Musrenbang tingkat Kabupaten dalam rangka memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi didalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial juga tidak terlepas dari Renstra Dinas Sosial Tahun 2021 s/d 2026 yang memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial selama 5 Tahun sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya serta dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Renja Dinas Sosial ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Sosial ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Sosial. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Sosial, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Sosial juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Sosial dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2023, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2023 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Sosial dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun yang akan datang.

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lima Puluh Kota



HARMEN, SH
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 19670816 199308 1 001



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 391 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 71) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tugas secara umum :
 - a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023;
 - b. Melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah seperti Forum Perangkat Daerah, dan rapat-rapat lainnya.
 - c. Menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja), mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
 - a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - c. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - e. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - f. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan

pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.

KELIMA

: Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan 2022 melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 6 Desember 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 391 TAHUN 2021

TANGGAL : 06 Desember 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	SEKRETARIAT DAERAH	
	Sekretaris Daerah	Ketua
	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
	Kabag Perencanaan Dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Pemerintahan	Anggota
	Kabag Hukum	Anggota
	Kabag Organisasi	Anggota
	Kabag Administrasi Pembangunan	Anggota
	Kabag Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kabag Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Anggota
	Kabag Kesejahteraan Rakyat	Anggota
	Kabag Umum	Anggota
	Kabag Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Pelaporan	Anggota
	Kasubag Protokol	Anggota
	Kasubag Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Kasubag Dokumentasi Pimpinan	Anggota
	Kasubag Kelembagaan Dan Anjab	Anggota
	Kasubag Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Anggota
	Kasubag Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	Anggota
	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perlengkapan	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota
	Kasubag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Anggota
	Kasubag Pimpinan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota
	Kasubag Penyusunan Program	Anggota
	Kasubag Pengendalian Program	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Evaluasi Dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Pembinaan BUMD Dan BLUD	Anggota
	Kasubag Perekonomian	Anggota
	Kasubag Sumber Daya Alam	Anggota
	Kasubag Peraturan Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Bantuan Hukum	Anggota
	Kasubag Dokumentasi Dan Informasi	Anggota
	Kasubag Bina Mental Dan Spiritual	Anggota
	Kasubag Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasubag Kesejahteraan Masyarakat	Anggota
	Kasubag Administrasi Pemerintahan Dan Kewilayahan	Anggota
	Kasubag Otonomi Daerah	Anggota
	Kasubag Kerjasama Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Daerah	Anggota
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Sekretaris DPRD	Ketua
	Kabag Umum dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Penganggaran	Anggota
	Kasubag Program dan Keuangan	Anggota
	Kasubag Kajian Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Humas, Protokol, dan Publikasi	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Pengawasan	Anggota
	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Persidangan dan Risalah	Anggota
	Kasubag Kerjasama dan Aspirasi	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3.	INSPEKTORAT	
	Inspektur	Ketua
	Sekretariat	Sekretaris
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
	Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Analisi Dan Evaluasi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Administrasi Umum Dan Keuanagn	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat	Anggota
	Pelaksana pada Inspektorat	Anggota
4.	DINAS KESEHATAN	
	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Kesehatan	Anggota
	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Anggota
	Kabid Kesehatan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Aset	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Alat Kesehatan dan Fasyankes	Anggota
	Kasi Pelayanan Kefarmasian dan Perizinan	Anggota
	Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
	Kasi Surveilens, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Nafza	Anggota
	Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Anggota
	Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Anggota
	Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Haji, dan Jaminan Kesehatan	Anggota
	Kasi Peningkatan Mutu dan Akreditasi, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Anggota
5.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Anggota
	Kabid Kebudayaan	Anggota
	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan BMD	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Kurikulum dan Penilaian	Anggota
	Kasi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasana	Anggota
	Kasi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Anggota
	Kasi Pendidikan Non Formal	Anggota
	Kasi PTK PAUD dan PNF	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP	Anggota
	Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
	Kasi Sejarah dan Nilai Tradisi	Anggota
	Kasi Kesenian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota
	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Pelaksanaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga	Anggota
	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Preservasi Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Perencanaan Jasa Konstruksi	Anggota
	Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan	Anggota
	Kasi Pemantauan Dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Tata Ruang	Anggota
	Kasi Pemanfaatan dan pengendalian	Anggota
	Kasi Pertanahan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya	Anggota
	Kasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Anggota
	Kasi Tata Bangunan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	Kepala Satpol PP	Ketua
	Sekretaris Satpol PP	Sekretaris
	Kabid Trantib	Anggota
	Kabid Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kabid PPUUD	Anggota
	Kabid SDA	Anggota
	Kasubag Program & Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Intelijen	Anggota
	Kasi Trantib & Pengamanan	Anggota
	Kasi Operasional & Logistik	Anggota
	Kasi Bina Potensi	Anggota
	Kasi Data Informasi	Anggota
	Kasi Satlinmas dan Pengaduan Masyarakat	Anggota
	Kasi Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kasi Penegakan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pengawasan & Penyuluhan	Anggota
	Kasi Pelatihan Dasar	Anggota
	Kasi Teknis Fungsional	Anggota
	Kasi Tindak Internal	Anggota
	Pelaksana pada Satpol PP	Anggota
8.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Ketua
	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran	Sekretaris
	Kabid Pencegahan	Anggota
	Kabid Pemadam Dan Penyelamatan	Anggota
	Kabid Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan Dan Inspeksi	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha	Anggota
	Kasi Pengendalian Operasi Dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Pemadam Dan Investigasi	Anggota
	Kasi Penyelamatan Dan Evakuasi	Anggota
	Kasi Pengadaan Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana	Anggota
	Kasi Informasi Dan Pengelolaan Data	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
9.	DINAS SOSIAL	
	Kepala Dinas Sosial	Ketua
	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Nafza dan Korban Perdagangan Orang	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	Anggota
	Kasi Jaminan Sosial Keluarga	Anggota
	Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Identitas Penduduk	Anggota
	Kasi Pindah Datang Penduduk	Anggota
	Kasi Pendataan Penduduk	Anggota
	Kasi Kelahiran	Anggota
	Kasi Perkawinan dan Perceraian	Anggota
	Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data	Anggota
	Kasi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Kerjasama	Anggota
	Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Inovasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Kepala DPPKBPPPA	Ketua
	Sekretaris DPPKBPPPA	Sekretaris
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk	Anggota
	Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
	Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan	Anggota
	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak	Anggota
	Pelaksana pada DPPKBPPPA	Anggota
12.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Kepala DPMPTSP	Ketua
	Sekretaris DPMPTSP	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Terpadu	Anggota
	Kabid Promosi	Anggota
	Kabid Perencanaan dan Pengembangan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya	Anggota
	Kasi Promosi	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Promosi	Anggota
	Kasi Data dan Informasi	Anggota
	Kasi Perencanaan Potensi dan Peluang Investasi	Anggota
	Kasi Penyuluhan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Regulasi Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pemantauan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pembinaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pengawasan Penanaman Modal	Anggota
	Pelaksana pada DPMPTSP	Anggota
13.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	
	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Ketua
	Sekretaris Perdagangan, Koperasi UKM	Sekretaris
	Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi & Usaha Mikro	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan perizinan	Anggota
	Kasi Peningkatan kualitas SDM koperasi & kewirausahaan	Anggota
	Kasi Metrologi	Anggota
	Kasi Pengembangan Jaringan Perdagangan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	Anggota
	Kasi Sarana Distribusi dan Stabilitas Barang Pokok dan Penting	Anggota
	Kasi Pengawasan Perizinan dan Pendaftaran	Anggota
	Kasi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Anggota
	Kasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan	Anggota
	Kasi Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Kesehatan Koperasi	
	Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Anggota
	Kasi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Anggota
14.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ketua
	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri	Anggota
	Kabid Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota
	Kabid Transmigrasi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Agro	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Non Agro	Anggota
	Kasi Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industri	Anggota
	Kasi Perizinan dan Data	Anggota
	Kasi Pengembangan teknologi Industri	Anggota
	Kasi Promosi dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
	Kasi Perlindungan Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
15.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Kepala Diskominfo	Ketua
	Sekretaris Diskominfo	Sekretaris
	Kabid Komunikasi Publik	Anggota
	Kabid Aplikasi Informatika	Anggota
	Kabid Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kabid Persandian Dan Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	Anggota
	Kasi Pengelola Media Komunikasi Publik	Anggota
	Kasi Layanan Hubungan Media Dan Kehumasan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Anggota
	Kasi Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Aplikasi	Anggota
	Kasi Statistik Sektor Ekonomi Dan Infastruktur	Anggota
	Kasi Statistik Sektor Pemerintahan Dan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kasi Identifikasi Deteksi Dan Proteksi Keamanan SIBER	Anggota
	Kasi Penanggulangan Pemulihan Pemantauan Dan Pengendalian	Anggota
	Kasi Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Pelaksana pada Diskominfo	Anggota
16.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Ketua
	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kabid Pariwisata	Anggota
	Kasi Promosi dan Informasi	Anggota
	Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Anggota
	Kasi Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kabid Pemuda	Anggota
	Kasi Peningkatan Kreatifitas Kewirausahaan Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Kompetensi Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Anggota
	Kabid Olahraga	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Pendidikan	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Prestasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan Tradisi	Anggota
	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pariwisata	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pemuda Olah Raga	Anggota
	Kasi Pendataan dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota
17.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
	Kepala DPMD/N	Ketua
	Sekretaris DPMD/N	Sekretaris
	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kabid Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Administrasi Produk Hukum Nagari dan Kerjasama antar Nagari	Anggota
	Kasi Organisasi Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Perencanaan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Aset dan Kekayaan Nagari	Anggota
	Pelaksana pada DPMD/N	Anggota
18.	DINAS PERHUBUNGAN	
	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris
	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Lalu Lintas	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	Anggota
	Kasi Pengujian Sarana	Anggota
	Kasi Angkutan	Anggota
	Kasi Pengoperasian Prasarana	Anggota
	Kasi Perawatan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Anggota
	Kasi Lingkungan Perhubungan	Anggota
	Kasi Keselamatan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
19.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN	
	Kepala DLHPP	Ketua
	Sekretaris DLHPP	Sekretaris
	Kabid Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kapasitas Lingkungan Hidup	
	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Operasional Penanganan Sampah	Anggota
	Kasi Pengelolaan Limbah dan Sampah	Anggota
	Kasi Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Anggota
	Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Perumahan	Anggota
	Kasi Kawasan Permukiman	Anggota
	Kasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Anggota
	Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota
	Pelaksana pada DLHPP	Anggota
20.	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	Kepala Distanhorbun	Ketua
	Sekretaris Distanhorbun	Sekretaris
	Kabid Sarana	Anggota
	Kabid Prasarana	Anggota
	Kabid Perlindungan Tanaman Dan Perizinan Usaha	Anggota
	Kabid penyuluhan	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Evaluasi	Anggota
	Kasubag Keuangan Dan Aset	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pupuk Dan Pestisida	Anggota
	Kasi Sumber Daya Genetik	Anggota
	Kasi Alat Dan Mesin Pertanian	Anggota
	Kasi Pengembangan Prasarana	Anggota
	Kasi Irigasi	Anggota
	Kasi Infrastruktur Pertanian	Anggota
	Kasi Perlindungan Tanaman	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Penanganan Dampak Perubahan Iklim Dan Bencana Alam	Anggota
	Kasi Perizinan Dan Pembinaan Usaha	Anggota
	Kasi Kelembagaan	Anggota
	Kasi Ketenagaan	Anggota
	Kasi Penyelenggaraan Penyuluhan	Anggota
	Pelaksana pada Distanhorbun	Anggota
21.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
	Kabid Perbibitan dan Produksi	Anggota
	Kabid Keswan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kabid. Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kabid Penyuluhan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Kasi Non Ruminansia	Anggota
	Kasi Kasi Ruminansia	Anggota
	Kasi Perbibitan	Anggota
	Kasi Kesmavet	Anggota
	Kasi Kesehatan Hewan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pakan	Anggota
	Kasi Pembiayaan dan Investasi	Anggota
	Kasi Lahan dan Irigasi	Anggota
	Kasi Kelembagaan	Anggota
	Kasi Metode dan Infomasi	Anggota
	Kasi Ketenagaan	Anggota
	Pelaksana pada Disnakkeswan	Anggota
22.	DINAS PERIKANAN	
	Kepala Dinas Perikanan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perikanan	Sekretaris
	Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutiah	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Mutu Pembudiyaaan Ikan	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Perikanan	Anggota
	Kasi Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perikanan	Anggota
23.	DINAS PANGAN	
	Kepala Dinas Pangan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pangan	Sekretaris
	Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
	Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Ketersediaan Pangan	Anggota
	Kasi Distribusi dan Harga Pangan	Anggota
	Kasi Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Anggota
	Kasi Pengembangan Pangan Lokal	Anggota
	Kasi Keamanan Pangan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pangan	Anggota
24.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
	Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Promosi dan Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan TIK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Arsip Statis dan Layanan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Fungsional Pustakawan	Anggota
	Fungsional Kearsipan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan	Anggota
25.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	Kepala Bapelitbang	Ketua
	Sekretaris Bapelitbang	Sekretaris
	Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Bapelitbang	Anggota
	Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Program Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Keuangan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pertanian dan Perikanan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perindustrian, Perdagangan, UMK, Penanaman Modal dan Pariwisata Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sosial Budaya Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sumber Daya Manusia Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Infrastruktur Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengembangan Wilayah Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Data dan Informasi Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang	Anggota
	Pelaksana pada Bapelitbang	Anggota
26.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
	Kepala BKPSDM	Ketua

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Sekretaris BKPSDM	Sekretaris
	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN	Anggota
	Kasubid Kepangkatan	Anggota
	Kasubid Mutasi	Anggota
	Kasubid Displin ASN	Anggota
	Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS	Anggota
	Kasubid Status ASN	Anggota
	Kasubid Informasi ASN	Anggota
	Kasubid Formasi dan Pengadaan ASN	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota
27.	BADAN KEUANGAN	
	Kepala Badan Keuangan	Ketua
	Sekretaris Badan Keuangan	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kabid Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Evaluasi Pendapatan Daerah	
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Badan Keuangan	Anggota
28.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Ketua
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
	Kabid Ideologi Dan Wasbang	Anggota
	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
	Kabid Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubid Bina Ideologi	Anggota
	Kasubid Bina Wasbang	Anggota
	Kasubid Bintah, Eksosbud Dan Agama	Anggota
	Kasubid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini	Anggota
	Kasubid HAL Dan Fasilitasi Pemilu	Anggota
	Kasubid Fasilitasi Parpol Dan Ormas	Anggota
	Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota
29.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
	Sekretaris BPBD	Sekretaris
	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan	Anggota
	Kasi Kesiapsiagaan	Anggota
	Kasi Kedaruratan	Anggota
	Kasi Logistik	Anggota
	Kasi Rehabilitasi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Rekonstruksi	Anggota
	Pelaksana pada BPBD	Anggota
30.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS	
	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	Ketua
	Kabag Tata Usaha	Sekretaris
	Kabid Perencanaan Pelaporan Sarana Prasarana dan Logistik	Anggota
	Kabid Pelayanan Penunjang dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Dan Logistik	Anggota
	Kasi Perencanaan Dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Non Medis Dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kasi Pelayanan Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Perawatan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Humas	Anggota
	Kasubag Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada RSUD Achmad Darwis	Anggota
31.	KECAMATAN GUGUAK	
	Camat Guguak	Ketua
	Sekretaris Camat Guguak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Guguak	Anggota
32.	KECAMATAN PAYAKUMBUH	
	Camat Payakumbuh	Ketua
	Sekretaris Camat Payakumbuh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh	Anggota
33.	KECAMATAN MUNGKA	
	Camat Mungka	Ketua
	Sekretaris Camat Mungka	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Mungka	Anggota
34.	KECAMATAN SULIKI	
	Camat Suliki	Ketua
	Sekretaris Camat Suliki	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Suliki	Anggota
35.	KECAMATAN BUKIK BARISAN	
	Camat Bukik Barisan	Ketua
	Sekretaris Camat Bukik Barisan	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan	Anggota
36.	KECAMATAN GUNUANG OMEH	
	Camat Gunuang Omeh	Ketua
	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
37.	KECAMATAN LUAK	
	Camat Luak	Ketua
	Sekretaris Camat Luak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Luak	Anggota
38.	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
	Camat Lareh Sago Halaban	Ketua
	Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Lareh Sago Halaban	Anggota
39.	KECAMATAN HARAU	
	Camat Harau	Ketua
	Sekretaris Camat Harau	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Harau	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
40.	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
	Camat Situjuah Limo Nagari	Ketua
	Sekretaris Camat Situjuah Limo Nagari	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Anggota
41.	KECAMATAN AKABILURU	
	Camat Akabiluru	Ketua
	Sekretaris Camat Akabiluru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru	Anggota
42.	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
	Camat Pangkalan Koto Baru	Ketua
	Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Anggota
43.	KECAMATAN KAPUR IX	
	Camat Kapur IX	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IX	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak
 Pada tanggal 6 Desember 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO